



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PUBLIK INFRASTRUKTUR
DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PDRB
(Studi Kasus pada Enam Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Periode 1990-2008)

TESIS

WIWIK PRIYANTORO
0706181164

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PUBLIK INFRASTRUKTUR
DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PDRB
(Studi Kasus pada Enam Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Periode 1990-2008)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

WIWIK PRIYANTORO
0706181164

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 27 Januari 2012


(Wiwik Priyantoro)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wiwik Priyantoro

NPM : 0706181164

Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Januari 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Wiwik Priyantoro
NPM : 0706181164
Program Studi : Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Pengeluaran Publik Infrastruktur dan Otonomi Daerah Terhadap PDRB (Studi Kasus pada Enam Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 1990-2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ringoringo H. Achmadi, SE., M.Soc.Sc. (.....)

Penguji : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc. (.....)

Penguji : Dr. Sonny Harry B. Harmadi (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik Kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Bapak Ringoringo H Achmadi, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3). Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (4). Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 27 Januari 2012

Wiwik Priyantoro

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwik Priyantoro
NPM : 0706181164
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Departemen : Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

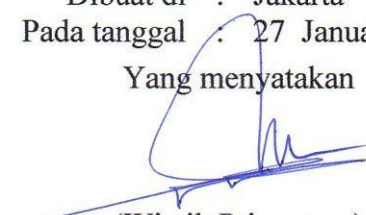
Analisis Pengaruh Pengeluaran Publik Infrastruktur dan Otonomi Daerah Terhadap PDRB (Studi Kasus pada Enam Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 1990-2008)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 2012

Yang menyatakan



(Wiwik Priyantoro)

ABSTRAK

Nama : Wiwik Priyantoro
Program Studi : Magister Manajemen Perencanaan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Pengaruh Pengeluaran Publik Infrastruktur dan Otonomi Daerah terhadap PDRB (Studi Kasus Pada Enam Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 1990-2008)

Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran publik infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada enam kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1990 – 2008 berupa data sekunder dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan data PDRB kabupaten. Analisa data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ekonometrik dan menggunakan model regresi linier berganda. Pengeluaran publik infrastruktur yang dikaji adalah pengeluaran publik infrastruktur transportasi, pengeluaran publik irigasi dan pengeluaran publik pertanian. Karena pada periode yang diteliti terdapat periode penerapan kebijakan otonomi daerah maka penelitian ini juga mengkaji pengaruh kebijakan otonomi daerah tersebut terhadap PDRB.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur transportasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jalan dan jembatan dan kebijakan otonomi daerah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB, sedangkan pengeluaran publik infrastruktur irigasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jaringan air berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB. Hasil analisis juga menunjukkan pengeluaran publik infrastruktur pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Secara simultan hasil pengujian terbukti pengeluaran publik infrastruktur transportasi dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Kata kunci :

Pengeluaran publik, infrastruktur, otonomi daerah, PDRB

ABSTRACT

Name : Wiwik Priyantoro
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : The affect of local government infrastructure expenditure on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) analysis by using the data of six local government in Nusa Tenggara Barat Province for periods of 1990-2008

The aim of this study is to examine the affect of local government infrastructure expenditure on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) by using the data of six local government in Nusa Tenggara Barat Province for periods of 1990-2008 with a particular focus on sectoral expenditures, using Econometric Model by applying multiple regression. This study examine government infrastructure expenditure on transportation, irrigation, and agriculture sector. We also identify the factors that can influence the GRDP. This variable is the decentralization policy.

The findings of this study suggest that infrastructure expenditure on transportation do give a significant positive and irrigation do give a significant negative impact on the fluctuation of each local government GRDP. It is also found that decentralization policy has significant influence on the GRDP positive direction. Government infrastructure expenditure on transportation and decentralization policy give a significant positive impact on the fluctuation local government GRDP simultaneously.

Key word :

Infrastructure expenditure, Gross Regional Domestic Product (GRDP), decentralization

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Keterbatasan Penelitian	7
2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.1 Model Pertumbuhan Solow	8
2.1.2 Model Ekonomi Keynesian	9
2.1.3 Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar	11
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto	13
2.2 Pengeluaran Publik (<i>Public Expenditure</i>)	16
2.3 Pengertian Infrastruktur	18
2.3.1 Karakteristik Infrastruktur	19
2.3.2 Keterkaitan Antara Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi ..	20
2.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah	22
2.5 Otonomi Daerah	25
2.6 Studi Terdahulu	29

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis	35
2.8 Hipotesa Penelitian	37
3 METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Desain Penelitian	38
3.3 Variabel Dependen dan Independen	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Pengukuran Variabel	41
3.6 Teknik Sampel	41
3.7 Metode Analisis Data	42
4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Pengeluaran Publik Infrastruktur Transportasi, Pertanian dan Irigasi	46
4.2 Analisis Hasil Uji Regresi	57
4.3 Hasil Analisis Asumsi Klasik	73
4.3.1 Uji Multikolinearitas	73
4.3.2 Uji Autokorelasi	73
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	74
5 KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR GAMBAR

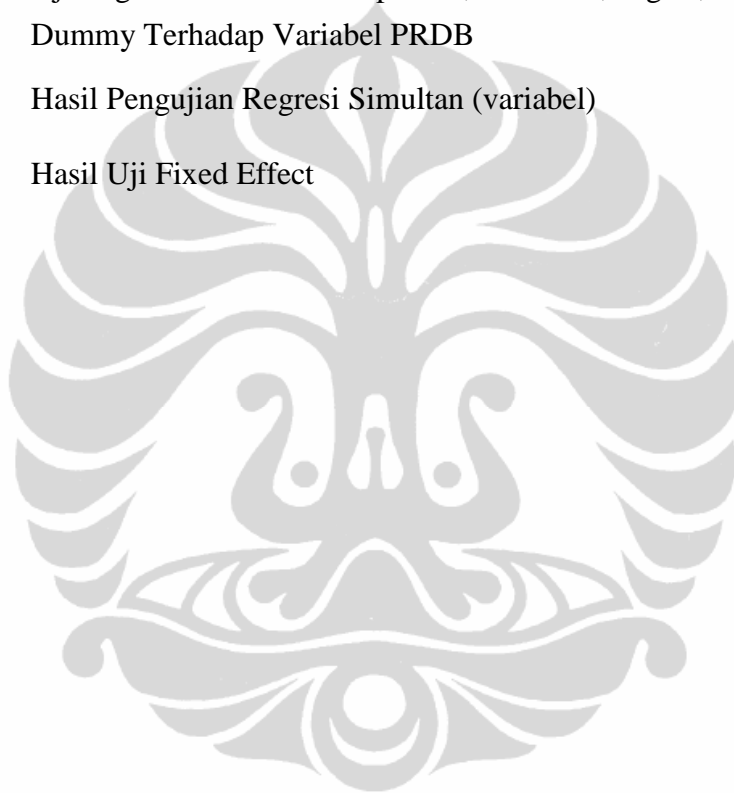
Gambar 2.1	Kenaikan Pengeluaran Pemerintah dalam Model IS-LM	23
Gambar 2.2	Hubungan antara Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dengan Porsi Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB	24
Gambar 2.3	Kontribusi Pengeluaran Publik terhadap PDRB	30
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis	36
Gambar 4.1	Grafik Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Bima	46
Gambar 4.2	Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Dompu	48
Gambar 4.3	Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Lombok Barat	49
Gambar 4.4	Pengeluaran Publik Infrastruktur Kabupaten Lombok Tengah	51
Gambar 4.5	Pengeluaran Publik Infrastruktur Kabupaten Lombok Timur	52
Gambar 4.6	Pengeluaran Publik Infrastruktur Kabupaten Sumbawa	54
Gambar 4.7	PDRB Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat	55
Gambar 4.8	PDRB Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Provinsi NTB	5
Tabel 2.1	Rekapitulasi Penelitian Terdahulu terkait dengan pengeluaran publik dan otonomi daerah	31
Tabel 4.1	Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel pada Kabupaten Bima	57
Tabel 4.2	Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel pada Kabupaten Dompu	59
Tabel 4.3	Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel pada Kabupaten Lombok Barat	61
Tabel 4.4	Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel pada Kabupaten Lombok Tengah	63
Tabel 4.5	Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel pada Kabupaten Lombok Timur	65
Tabel 4.6	Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel pada Kabupaten Sumbawa	67
Tabel 4.7	Ringkasan Hasil Uji Regresi Pengujian Semua Data (OLS) pada Seluruh Kabupaten	69
Tabel 4.8	Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel pada Seluruh Kabupaten Pendekatan Efek Tetap (<i>Fixed Effect</i>)	70
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Multikolinearitas	73
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Autokorelasi	74
Tabel 4.11	Hasil Pengujian Heterokedastisitas	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Pengeluaran Publik Infrastruktur Transportasi, Pertanian, dan Irigasi	80
Lampiran 2	Data PDRB Enam Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat	87
Lampiran 3	Uji Regresi Variabel Transportasi, Pertanian, Irigasi, dan Dummy Terhadap Variabel PRDB	88
Lampiran 4	Hasil Pengujian Regresi Simultan (variabel)	94
Lampiran 5	Hasil Uji Fixed Effect	95



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber daya keuangan daerah yang dimiliki dan diperoleh pemerintah daerah perlu dialokasikan secara efektif dan efisien untuk pembangunan daerah. Alokasi sumber daya keuangan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang antara lain digunakan untuk memperbaiki mutu infrastruktur yang suatu daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip desentralisasi menempatkan kabupaten dan kota sebagai wilayah pembangunan otonom, yang mempunyai kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah yurisdiksinya. Salah satu cara untuk mengoperasionalkan prinsip desentralisasi adalah dengan membagikan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui pemberian otonomi. Otonomi daerah adalah sesuatu yang diberikan untuk diterima oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan pemerintah daerah melalui proses pemerintahan.

Tujuan kebijakan otonomi daerah, seperti yang diharapkan masyarakatnya, adalah untuk peningkatan kesejahteraan termasuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Tanpa peningkatan kesejahteraan ekonomi, otonomi daerah tidaklah memiliki arti bagi masyarakatnya.

Kesejahteraan masyarakat, termasuk di tingkat daerah, hanyalah dapat diperoleh melalui pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat adalah besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Otonomi daerah harusnya dalam tahap implementasi memiliki pengaruh yang berarti terhadap jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu yang tercermin pada angka PDRB. Bila hal ini dikritisi lebih lanjut, akan memunculkan pertanyaan yang diformulasikan sebagai seberapa besar pengaruh implementasi otonomi daerah terhadap PDRB di suatu daerah otonom tertentu. Otonomi daerah yang melibatkan organisasi pemerintah daerah diprediksi memiliki keterkaitan dengan PDRB di daerah otonom yang bersangkutan.

Sebagai organisasi, pemerintah daerah mempunyai pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran pemerintah (*public expenditure*). Pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk pembiayaan berbagai sektor kehidupan masyarakatnya termasuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Konsekuensi logisnya, pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian daerah yang ditandai oleh besaran PDRB. Hal ini memunculkan pula pertanyaan kritis, seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah khusus dibidang infrastruktur terhadap PDRB.

Pengaruh kebijakan fiskal, komposisi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi objek penelitian dan pendalaman oleh para ekonom sejak dulu. Semler, Willi (2007) yang meneliti di 36 negara dengan level pendapatan yang berbeda, menyimpulkan antara lain bahwa *we suggest a general model of fiscal policy and growth in an economy with a government that taxes optimally and undertakes public expenditure on (a) education and health facilities (b) public infrastructure such as roads and bridges (c) public administration (d) transfers and public consumption facilities and (e) debt service*. Simpulan tersebut menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya pengeluaran publik, antara lain dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Pembangunan infrastruktur pada sektor transportasi, irigasi, pertanian, pendidikan, kesehatan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi oleh Ghosh, (2005:81). Sementara itu, pendapat yang dikemukakan oleh Le (2005) bahwa pengeluaran publik merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi publik juga merupakan faktor yang memberikan kontribusi terhadap akumulasi modal.

Pentingnya peranan infrastruktur, baik infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh swasta, dalam menunjang pembangunan dimulai dengan diperkenalkannya model pertumbuhan setelah berakhirnya perang dunia kedua, yaitu pada tahun 1950 – 1960 an oleh para pakar ekonomi pembangunan seperti Rostow dan Harrod-Domar. Menurut Rostow, salah satu dari sekian banyak strategi pembangunan ekonomi adalah pengeluaran publik atau pemerintah guna membiayai infrastruktur yang memadai untuk mempercepat laju pertumbuhan

ekonomi. Salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*), yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar *output* dan pendapatan di kemudian hari (Todaro, 2003).

Peranan pengeluaran publik infrastruktur, yang merupakan salah satu bagian dari akumulasi modal, terhadap pertumbuhan ekonomi semakin sering diteliti dan diperdebatkan para ekonom dan teoritikus pembangunan seiring dengan meningkatnya isu desentralisasi fiskal ditandai dengan meningkatnya peran pemerintah dalam alokasi dan distribusi sumber daya keuangan. Pengeluaran publik meskipun pada awalnya tidak efisien, tetapi dalam jangka panjang akan sangat efisien. Disamping itu pengeluaran pemerintah juga akan mengurangi "kesesakan" pada daerah yang sudah terlalu padat, karena penduduk akan bersedia pindah ke daerah baru yang sudah tersedia infrastrukturnya. Infrastruktur merupakan barang komplementer yang sangat penting bagi investasi swasta karena dapat menurunkan biaya angkut dan meningkatkan volume perdagangan serta merupakan faktor penentu pertumbuhan jangka panjang yang dominan (Jhingan, 2004).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Mankiw, 2003). Dalam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan dituntut untuk menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif para pelaku ekonomi. Salah satu kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan tersebut adalah dengan mendorong terciptanya iklim investasi yang baik. Peran pemerintah daerah dapat dijalankan

melalui salah satu instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah (baik belanja rutin maupun pembangunan dan atau pemeliharaan dan belanja modal), dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pembangunan (berupa belanja modal dan pemeliharaan) merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional membutuhkan infrastruktur yang cukup besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi, yang sebagian besar diharapkan berasal dari masyarakat yang mempunyai struktur perekonomian secara nominal sebagian besar masih disumbang oleh sub-sektor pertambangan non-migas, namun secara riil sektor pertanian sudah menjadi penyumbang terbesar sejak tahun 2006.

Perekonomian NTB memiliki dua karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Jika didasarkan harga berlaku (nominal), pada periode 2004-2008, perekonomian NTB didominasi oleh sub-sektor pertambangan non-migas dengan sumbangan rata-rata per tahun sebesar 33,5 persen. Namun demikian, jika memperhitungkan inflasi pada masing-masing sektor (riil), kontribusi sektor pertanian sudah lebih tinggi dibanding sub-sektor pertambangan non-migas sejak tahun 2006, dan lebih tinggi dibanding sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2008. Lebih tingginya kontribusi riil sektor pertanian dibanding sub-sektor pertambangan non-migas disebabkan oleh dua hal : (i) pada periode 2004-2008 tingkat inflasi pada sub-sektor pertambangan non-migas selalu lebih tinggi dibanding pada sektor pertanian; dan (ii) secara produktivitas, sub-sektor pertambangan non-migas di NTB mengalami tiga kali pertumbuhan riil negatif, sementara sektor pertanian pada kurun waktu yang sama selalu tumbuh positif.

Sektor Pertanian mewarnai karakteristik perekonomian di Provinsi NTB, berbeda dengan sektor pertambangan non-migas yang hanya berpusat di Kabupaten Sumbawa Barat, sektor pertanian merupakan sektor yang memberi kontribusi terbesar di enam kabupaten di Provinsi NTB. Hal ini

menunjukkan karakteristik perekonomian NTB secara umum masih bersifat agraris. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Provinsi NTB

No.	Uraian	Tahun		
		2006	2007	2008
		%	%	%
1	Persentase PDRB Provinsi NTB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha	22,75	21,42	23,22
2	Persentase PDRB Provinsi NTB ADH Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha	25,57	25,08	25,91
3	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha	11,87	10,39	14,03
4	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB ADH Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha	2,88	2,9	6,01

Sumber: Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2010

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi sangat menarik untuk dilakukan penelitian terhadap pengaruh pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur daerah, terutama untuk infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, pada enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan kabupaten di NTB yang diteliti menggunakan pertimbangan ketersediaan data penelitian, karakteristik perekonomian masyarakatnya relatif sama yaitu masyarakat agraris, dan dalam satu wilayah provinsi sehingga kebijakan di tingkat provinsi relatif sama. Pengeluaran pemerintah infrastruktur yang diteliti terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi agraris yaitu belanja pemerintah untuk infrastruktur transportasi, irigasi dan pertanian periode 1990 sampai dengan tahun 2008.

Karena dalam periode yang diteliti tersebut terdapat perubahan kebijakan otonomi daerah maka perlu juga diteliti pengaruhnya terhadap PDRB. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pengeluaran publik infrastruktur dan otonomi daerah terhadap PDRB pada enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 1990-2008, yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran publik infrastruktur transportasi (pembangunan dan pemeliharaan jalan, pelabuhan, dan bandara) terhadap PDRB enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008?
2. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran publik infrastruktur sumber daya air dan irigasi (sumber daya air) terhadap PDRB enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008?
3. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran publik infrastruktur pertanian (percetakan sawah dan pembukaan lahan) terhadap PDRB enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008?
4. Bagaimana pengaruh pelaksanaan kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran publik infrastruktur transportasi (pembangunan dan pemeliharaan jalan, pelabuhan, dan bandara) terhadap PDRB enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran publik infrastruktur sumber daya air dan irigasi (sumber daya air) terhadap PDRB enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran publik infrastruktur pertanian (percetakan sawah dan pembikaan lahan) terhadap PDRB enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. sebagai penjelasan atas pengaruh pengeluaran publik infrastruktur transportasi, irigasi dan pertanian terhadap PDRB enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. secara akademik, diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan bahan kajian terhadap perekonomian terutama di enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008;
3. secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi.

1.4 Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang dikaji, maka perlu dilakukan pembatasan penelitian, yang terdiri dari: (1)Waktu penelitian (*time series data*) yang digunakan dimulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2008, (2)Pengeluaran publik yang dikaji hanya belanja untuk infrastruktur transportasi, infrastruktur sumberdaya air dan jaringan irigasi serta infrastruktur pertanian, (3)Faktor desentralisasi dikaji atau mengacu pada pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu penelitian ini juga mempunyai keterbatasan data yaitu data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, berupa data belanja pembangunan atau belanja modal yang diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD, Inpres pembangunan, yang tidak dapat dirinci lebih spesifik dan tidak dapat dipisahkan lebih detail untuk dianalisa lebih lanjut misalnya belanja infrastruktur transportasi terdiri dari belanja jalan, jembatan dan terminal. Selain itu, belanja pemerintah untuk infrastruktur kabupaten yang berasal dari APBD Provinsi dan APBN tidak termasuk dalam penelitian ini karena data tidak diperoleh.

Keterbatasan lainnya adalah bahwa mulai tahun fiskal 2002 pemerintah menerapkan *unified budget* yang tidak lagi membagi rutin dan pembangunan sehingga klasifikasi belanja infrastruktur berubah.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Taggart et.al (2003) pertumbuhan ekonomi adalah ekspansi yang dilakukan secara terus menerus dari kemungkinan produksi di suatu negara yang diakibatkan dari akumulasi kapital dan perubahan teknologi.

Alasan utama perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah demi peningkatan kesejahteraan ekonomi termasuk pada level makro negara, walaupun cukup banyak terminologi tentang pertumbuhan ekonomi, definisi pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan adalah *the persistent expansion of a countrys production possibilities that result from capital accumulation technological change* (Taggart et.al, 2003) pertumbuhan ekonomi adalah ekspansi yang secara terus menerus dari kemungkinan produksi di suatu negara yang diakibatkan dari akumulasi kapital dan perubahan teknologi.

2.1.1 Model Pertumbuhan Solow

Model pertumbuhan Solow (Mankiw, 2003:175) menyatakan bahwa model pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan atau dapat dikatakan bahwa keseluruhan output barang dan jasa di suatu negara ditentukan oleh persediaan modal, angkatan kerja dan kemajuan teknologi yang digunakan.

Sementara itu, Robert Solow mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai model pertumbuhan solow. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agrerat sebagai berikut (Dornbusch *et al.*, 2004).

$$Y = A \cdot f(K, L)$$

Dimana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (capital) fisik, L adalah tenaga kerja, dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input K atau L, atau keduanya meningkat.

Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. *Output* (*Y*) juga akan meningkat bila terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan *A*. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas.

2.1.2. Model ekonomi Keynesian

Peran investasi termasuk investasi infrastruktur dalam aktivitas ekonomi dapat dipisahkan atas perannya sebagai komponen pengeluaran agregat dan perannya dalam proses produksi. Investasi merupakan bagian dari komponen pengeluaran agregat, sedangkan stok kapital fisik infrastruktur merupakan bagian dari faktor produksi dalam fungsi produksi sektoral atau agregat.

Berdasarkan kategori tersebut, penjelasan teoritis mengenai peran investasi akan dilihat dari sisi permintaan dalam sebuah model makroekonomi dan sisi penawaran yang dipresentasikan oleh model pertumbuhan ekonomi. Pada bagian ini akan diuraikan teori sisi permintaan yaitu model ekonomi keynesian.

Model ekonomi makro Keynesian merupakan teori yang menjelaskan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek dengan menfokuskan perhatiannya pada sisi pengeluaran agregat. Identitas produk nasional bruto (PNB) standar Keynesian dapat diilustrasikan sebagai berikut :

$$C + I + G + (X-M) = PNB = C + S + T + R_f$$

Keterangan :

- C* : total pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap barang dan jasa
- I* : Investasi
- G* : pengeluaran pemerintah
- (X-M)* : ekspor bersih barang dan jasa
- S* : tabungan swasta bruto
- T* : penerimaan pajak bersih
- R_f* : total pembayaran transfer ke luar negeri

Identitas di atas menunjukkan bahwa kondisi ekuilibrium dicapai ketika total pengeluaran agregat sama dengan total pendapatan agregat dan keduanya sama dengan total nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian. Pada posisi keseimbangan, nilai ekspor bersih sama dengan total pembayaran ke luar negeri, sehingga kedua komponen ini dapat dikeluarkan untuk penyederhanaan identitas pendapatan nasional, sebagai berikut :

$$C + I + G + = PNB = C + S + T$$

Seluruhnya komponen pengeluaran dan pendapatan agregat apabila dideflasikan terhadap tingkat harga umum yang berlaku, diperoleh identitas pendapatan nasional dalam nilai riil sebagai berikut :

$$c + i + g + = y = c + s + t$$

Keterangan:

$$t = t'y; \quad t' > 0$$

$$c = c'y_d; \quad c' > 0$$

$$s = s'y_d; \quad s' > 0$$

$$i = \bar{i};$$

$$g = \bar{g};$$

$$y_d = y - ty;$$

Pada persamaan penerimaan pajak (t), total pengeluaran konsumsi (c) dan total tabungan (s) semuanya merupakan fungsi tingkat pendapatan, dengan kecenderungan tambahan pajak (t') atau *marginal propensity to tax* (MPT), kecenderungan tambahan konsumsi (c') atau *marginal propensity to consume* (MPC) dan kecenderungan tambahan tabungan (s') atau *marginal propensity to save* (MPS) positif tetapi lebih kecil dari satu. Pada persamaan investasi swasta (i) dan pengeluaran pemerintah (g) diasumsikan sebagai faktor eksogenus.

Seluruh komponen pengeluaran agregat apabila disubsitusikan ke sisi pengeluaran pada persamaan asal akan diperoleh pengeluaran agregat riil sebagai berikut :

$$y = c(y - ty) + \bar{i} + \bar{g}$$

Derivasi total pendapatan nasional, y , terhadap komponen c , t , g , dan i pada persamaan di atas dan menyusunnya kembali akan menghasilkan efek pengganda (multiplier) pendapatan dari perubahan faktor eksogen investasi swasta dan pengeluaran pemerintah sebagai berikut :

$$dy = \frac{1}{1 - c(1 - t)} (d\bar{i} + d\bar{g})$$

Pada persamaan di atas, setiap perubahan faktor eksogen investasi swasta dan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan perubahan pendapatan nasional sebesar hasil kali angka pengganda dengan kenaikan komponen pengeluaran tersebut. Besarnya dampak kenaikan investasi dan pengeluaran pemerintah tersebut tergantung pada MPC dan MPT, semakin besar MPC dan semakin kecil MPT maka semakin besar dampak perubahannya terhadap pendapatan nasional.

2.1.3. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar

Model pertumbuhan Harrod-Domar (*Harrod-Domar growth model*) merupakan model pertumbuhan Keynesian yang secara luas telah banyak diaplikasikan pada negara-negara sedang berkembang (Todaro 2006). Domar menkonstruksi teorinya dengan menekankan peran ganda yang dimainkan oleh investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi mempengaruhi permintaan agregat melalui proses investment multiplier, dan dalam jangka panjang merupakan proses akumulasi modal yang akan menambah stok kapital dan meningkatkan kapasitas produksi sehingga investasi juga mempengaruhi penawaran agregat. Domar dalam hal ini hendak menjawab tingkat investasi yang diperlukan agar peningkatan permintaan agregat sama dengan kapasitas produksi sehingga pemanfaatan kapasitas penuh dapat dipertahankan.

Pada model Domar, dinyatakan bahwa pertumbuhan permintaan agregat sama dengan investasi (I) dikalikan dengan besaran multiplier ($1/s$). Sedangkan

pertumbuhan kapasitas produksi (penawaran agregat) sama dengan investasi dibagi rasio kapital output (k).

Menurut Harrod, pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan atas pertumbuhan aktual, pertumbuhan yang diinginkan dan pertumbuhan alamiah. Pertumbuhan aktual (the actual growth = $\Delta Y/Y$) adalah laju pertumbuhan sesungguhnya yang besarnya ditentukan oleh rasio tabungan-output (S/Y) dan rasio tambahan kapital-output ($\Delta K/\Delta Y$). Kedua besaran dianggap konstan dan melalui manipulasi matematis akan sama dengan tabungan. Pada tingkat laju pertumbuhan aktual, output aktual tidak sama dengan output potensial.

Laju pertumbuhan yang diinginkan adalah laju pertumbuhan yang dianggap memadai oleh para investor sehingga menjamin tercapainya kapasitas penuh atau keseimbangan permintaan dan produksi dalam jangka panjang. Permintaan agregat dianggap cukup tinggi oleh para investor pada laju pertumbuhan ini sehingga dapat menjamin terjualnya seluruh kapasitas pabrik yang ada. Output aktual dalam sama dengan output potensial sehingga tidak terjadi variasi siklis dalam pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ini tercapai apabila output (aktual dan potensial), permintaan agregat, stok kapital, dan investasi tumbuh pada tingkat yang sama.

Kondisi ekuilibrium sangat jarang terjadi, sehingga Harrod berkesimpulan bahwa didalam proses pertumbuhan ekonomi terkandung ketidakstabilan yang sewaktu waktu dapat mengganggu keadaan ekuilibrium. Selama proses pertumbuhan ekonomi berlangsung, tidak ada kekuatan yang secara otomatis dapat membawa penyimpangan tersebut kembali kepada kondisi ekuilibrium.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang hanya dapat tercapai melalui intervensi pemerintah lewat kebijakan fiskal dan moneter untuk menanggulangi gangguan penyimpangan dan ketidakstabilan. Kedua kebijakan tersebut sangat berperan untuk meningkatkan investasi dalam sektor infrastruktur yang akan meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek dan memperluas kapasitas produksi serta menjamin keberlanjutan proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto

Keseluruhan produk barang dan jasa yang diproduksi pada saatnya memerlukan pengukuran karena barang dan jasa yang diproduksi tetap mempunyai nilai ekonomi yang pada level makro di sebut sebagai *Gross Domestic Product (GDP)*. *GDP is the aggregate value of all final goods and services product in the economic during a given time period – usually a year* (Taggart et.al :2003). GDP adalah nilai agregat dari keseluruhan produk barang dan jasa final dalam perekonomian selama suatu jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Cukup jelas terlihat bahwa pertumbuhan perekonomian suatu negara diperlihatkan oleh seberapa besar peningkatan GDP Negara yang bersangkutan. GDP menjadi salah satu indikator pertumbuhan perekonomian yang cukup penting untuk menilai laju pertumbuhan ekonomi demi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pengukuran produk domestik lazimnya dilakukan dalam tataran kotor (gross) karena mengabaikan adanya depresiasi (penurunan harga tahunan) sebagai efek domino inflasi. Karenanya produk domestik biasanya dikuantifikasikan dalam bentuk *Gross Domestic Product (GDP)*.

Yang dimaksudkan dengan GDP adalah

“the money value at market prices of a countrys total output of final goods and services produced during the year “. (Hogendorn, 1992).

GDP adalah nilai uang pada harga pasar dari suatu negara sebagai keseluruhan keluaran barang dan jasa final yang diproduksi selama satu tahun.

Sama dengan Hogendorn, (1992), Taylor, (1995) menyatakan bahwa *GDP is a measure of the value of all final goods and services newly produced in a country during some period of time*. GDP adalah ukuran nilai dari keseluruhan barang dan jasa final yang diproduksi baru dalam suatu negara selama beberapa periode waktu. Sekaligus memperlihatkan bahwa GDP bersangkutan dengan apa, dimana dan kapan produksi itu dilakukan.

Pada sisi lainnya, GDP juga dapat diukur melalui pendekatan pendapatan. Asumsi dasarnya, pendapatan seseorang adalah ukuran dari apa yang diproduksinya. Posisi setiap orang sebagai tenaga kerja adalah penentu pertumbuhan ekonomi, demikian alur pikir GDP melalui pendekatan pendapatan.

GDP memang pendapatan tenaga kerja secara totalitas dalam lingkup nasional. Artinya GDP mencerminkan keseluruhan pendapatan yang diperoleh semua orang disemua lapangan pekerjaan yang memproduksi barang / jasa yang diukur melalui besaran nilai uang.

Menurut Mankiw, (2003:522) GDP adalah pendapatan total yang diperoleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh faktor-faktor produksi yang dimiliki asing; pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik.

GDP yang lazim di ukur dalam rentan satu tahun, selama waktu tertentu dapat saja berfluktuasi menaik atau menurun karena banyak sebab. Untuk lebih meyakinkan tentang besaran GDP yang sesungguhnya dilakukan pengukuran beberapa tahun selama jangka waktu tertentu. Angka rata-rata yang didapat setelah dilakukan pengukuran GDP selama jangka waktu tertentu menjadi real GDP dan menjadi lebih dipercaya dibanding GDP untuk satu tahun.

Real GDP yang seharusnya lebih menjadi perhatian dalam pertumbuhan ekonomi mempunyai kecenderungan meningkat kalaulah dipenuhi empat alasan pembeda yaitu *growing labour force, growing stock of capital equipment, advance in teknologi, more efficient lost of currently available resources* (Taggart et.al:2003).

Seperti disebutkan Taylor, John B (2001) yang menyatakan bahwa,

“government policy can influence long term economic growth by affecting these three factors. To raise long term economic growth, government fiscal policies can provide incentives for investment in capital, for research and development of new technologies, for education and for increased labor supply. A monetary policy of low and stable inflation can also have positive effect on economic growth”.

Kebijakan pemerintah dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang didapatkan melalui tiga faktor. Pemunculan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, kebijakan fiskal pemerintah dapat menjadi insentif untuk investasi modal, penelitian dan pengembangan teknologi baru, untuk pendidikan dan untuk meningkatkan suplai tenaga kerja. Kebijakan moneter dari inflasi yang stabil dan rendah dapat juga memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jadi GDP dan pertumbuhan ekonomi adalah sesuatu yang senantiasa dijadikan kenyataan faktual oleh pemerintah dan semua pelaku ekonomi. Namun tetap harus dicatat bahwa seminimalnya GDP dan pertumbuhan ekonomi sebagai gejala ekonomi makro, sangatlah rentan terhadap pertumbuhan penduduk dan inflasi.

Kerentanan (*vulnerability*) GDP dan pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk mudah dirasionalkan. Bilamana persentase atau besaran pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding besaran atau persentase pertumbuhan ekonomi berarti tidak ada pertumbuhan ekonomi. Artinya yang diinginkan adalah semakin kecilnya angka pertumbuhan penduduk dibanding angka pertumbuhan ekonomi. Caranya tentu saja melewati alternative (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin dan (2) mengurangi angka pertumbuhan penduduk menjadi sekecil mungkin.

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang akhir dan jasa (*final goods and service*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Produk Domestik Bruto dalam satu wilayah dikenal dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi.

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan (BPS, 2007). Pembangunan perlu direncanakan dengan baik dan hasil pembangunan harus terus diamati agar mencapai tingkat pertumbuhan dengan struktur ekonomi yang diharapkan. Perencanaan pembangunan dan pengamatan terhadap hasil-hasilnya akan dapat dilakukan dengan lebih baik dan terarah apabila dilandaskan pada data statistik yang baik dan cermat. Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah seringkali diukur melalui PDRB dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai wilayah tersebut.

Apabila kita ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah, indikator umum yang dapat digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan catatan tentang jumlah nilai rupiah dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu negara untuk waktu satu tahun (Nurrochmat et al, 2007). Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di negara tersebut, dimana hal ini dapat dijadikan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Wikipedia, 2010). Menurut BPS (2002) nilai PRDB suatu negara sebenarnya sama dengan nilai tambah produksi yang diciptakan oleh semua sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha) di negara tersebut. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB suatu negara, yaitu melalui pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi.

2.2 Pengeluaran Publik (*Public Expenditure*)

Melalui *The Circular Flow of Income and Expenditure* oleh Taylor, John. B, (2001) menjelaskan aktivitas pemerintah sebagai pelaku ekonomi diantara keseluruhan pelaku ekonomi nasional. Pemerintah memungut pajak dari konsumen serta melakukan *government purchasing* (pembelian pemerintah) dan melakukan pembayaran transfer. Itulah arus yang sirkuler dari posisi pemerintah selaku pelaku ekonomi makro.

Serupa dengan Taylor, Baumoll, William J (1999) menjelaskan melalui *The Circular Flow of Expenditure and Income* adanya posisi pemerintah dan aktivitas yang dilakukannya pada arus pengeluaran dan pendapatan semua pelaku ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah menerima pendapatan dari pajak (taxes) dan melakukan *government purchases* (pembelian pemerintah) serta melakukan *transfer payment* (pembayaran transfer). Disebutkannya pula bahwa

“government purchases, symbolized by the letter G, refer to the good (such as airplane and paper clips) and services (such as school teaching and police protection) purchased by all levels of government. Dilanjutkannya bahwa transfer payment are sums of money that the government gives certain individuals as out right grants rather than as payment for services rendered to employee. Some common example are sosial security and unemployment benefits”.

Dengan demikian, pembelian pemerintah disimbolkan oleh huruf G, merujuk kepada barang (seperti pesawat udara dan penjepit kertas) dan pelayanan (seperti pembelajaran sekolah dan proteksi polisi) dibeli oleh semua level pemerintah. Sedangkan pembayaran transfer adalah sejumlah uang yang diberikan pemerintah pada individu sebagai bantuan diluar keharusan daripada sebagai pemberian untuk pelayanan yang disumbangkan untuk pekerja. Beberapa yang umum contohnya jaminan sosial dan benefit untuk mereka yang tidak bekerja.

Pengeluaran publik mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah memutuskan barang dan jasa yang akan disediakan serta kuantitas dan kualitasnya, pengeluaran publik menunjukkan biaya pelaksanaan kebijakan tersebut. Definisi ini dibagi dua. Pertama, pengeluaran belanja untuk menyediakan barang dan jasa melalui anggaran sektor publik. Kedua, peraturan dan undang-undang yang dihasilkan pemerintah ada pada pengeluaran sektor swasta. Misalnya, peraturan bahwa setiap hotel harus ada alat pemadam kebakaran menyebabkan hotel harus mengeluarkan uang untuk membelinya.

Kegiatan pemerintah yang perlu pengeluaran pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi inefisiensi alokasi dan distribusi akibat kegagalan pasar. Pemerintah menyediakan barang publik dan barang kuasi-publik dengan pembayaran transfer akibat permintaan masyarakat.

Peningkatan pengeluaran publik harus dikaitkan dengan meningkatnya tingkat harga, pertumbuhan GNP, dan perubahan penduduk. Pengeluaran publik diwakili oleh dua kategori kegiatan pemerintah : Pertama, terkait dengan pembelian barang dan jasa pemerintah (misalnya, tenaga kerja) serta barang dan jasa modal (misalnya, investasi pembangunan jalan). Pengeluaran publik tersebut merupakan pembelian input sektor publik dan dihitung dengan mengalikan jumlah dengan harga input. Kategori kedua pengeluaran publik adalah pengeluaran transfer, misalnya pensiun, subsidi, bunga hutang, tunjangan pengangguran, dsb. Pengeluaran ini tidak mengklaim sumber daya masyarakat oleh sektor publik. Transfer merupakan redistribusi sumber daya antara individu di masyarakat, dimana sektor publik bertindak sebagai perantara.

Dari ulasan diatas jelas bahwa aktivitas pemerintah adalah (1) melakukan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah serta (2) melakukan

pembayaran transfer karena fungsi, tanggung jawab dan peran yang harus dijalankannya. Sehingga yang disebut sebagai pengeluaran pemerintah adalah sejumlah uang yang berasal dari kas pemerintah yang digunakan untuk pembelian barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah serta melakukan pembayaran transfer sesuai fungsi, tanggung jawab dan peran pemerintah.

Ukuran besaran pembayaran transfer dibanding dengan pembelian barang/jasa kebutuhan pemerintah sangatlah kontekstual adanya. Begitu juga dengan besaran antar item-item barang/jasa yang dibeli oleh pemerintah tentu akan sangat kondisional sifatnya. Penjabaran lebih lanjut tentang apa yang akan dibeli termasuk besaran pembeliannya adalah hasil dari proses kebijakan pemerintah itu sendiri. Adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai produk sistem pemerintahan, bersangkutan dengan pengeluaran pemerintah. Tentu akan muncul pembelian dan pembayaran transfer yang dilakukan pemerintah pusat serta pembelian dan pembayaran transfer yang dilakukan pemerintah daerah.

2.3 Pengertian Infrastruktur

Fasilitas infrastruktur dipahami sebagai input infrastrukturnal publik dari sudut pandang suplai. Namun, dilihat dari sifat pelayanan yang diberikan, infrastruktur secara luas dapat digolongkan menjadi kategori fisik, sosial dan finansial. Kategori fisik meliputi transportasi (rel kereta, jalan, jalur udara dan jalur perairan), listrik, irigasi, telekomunikasi, suplai air dan sebagainya. Walau pengaruhnya bersifat langsung terhadap produksi melalui ekonomi eksternal, namun aspek tersebut berpengaruh pula secara menguntungkan dalam menarik investasi privat (domestik dan asing). Infrastruktur fisik berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi biaya transaksi dan menciptakan banyaknya investasi, lapangan kerja, hasil (output), pendapatan dan pertumbuhan sampingan. Infrastruktur sosial berkontribusi melalui pengayaan sumber daya manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan, fasilitas rekreasi dan sebagainya. Dengan kata lain, memajukan kualitas hidup. Infrastruktur ini berpengaruh terhadap tingginya sumber daya manusia dalam hal kualitas dan membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Selanjutnya, infrastruktur

finansial yang meliputi kerjasama perbankan, pos, dan pajak dari suatu populasi yang mewakili kinerja finansial negara. Tiga aspek ini mewakili kemampuan menciptakan penghasilan dari suatu daerah dalam suatu negara atau suatu negara dalam suatu wilayah. Dan karenanya, dapat memicu kompetisi yang tentunya menyehatkan diantara daerah-daerah konstituen.

Suatu jaringan infrastruktur ekonomi adalah iklim sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh institusi yang berfungsi sebagai medium perdagangan (*conduits of commerce*). Institusi disini dapat berupa institusi publik ataupun privat. Peranan mereka dapat silih berganti, membantu mentransformasikan sumber-sumber kedalam output atau berfungsi sebagai perubah, yang merubah sumber-sumber menjadi non-produker. Peranannya sangat kritis dalam menurunkan ketidaksamaan secara natural diantara daerah-daerah dalam satu negara.

Secara umum, infrastruktur adalah konsep sosial untuk beberapa kategori khusus dari input diluar proses pengambilan keputusan, yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi dengan cara meningkatkan produktivitas dan penyediaan fasilitas. Dibutuhkan jangka waktu yang panjang untuk menciptakan fasilitas-fasilitas ini. Sebagai contoh, Hansen (1965 dalam De dan Ghosh, 2005:94), dalam pengamatannya pada peranan investasi publik dalam perkembangan ekonomi, membagi infrastruktur publik menjadi dua kategori: economic overhead capital (EOC) dan sosial overhead capital (SOC). Mera (1973) dalam De dan Ghosh, (2005:94) mengamati pengaruh ekonomi dari infrastruktur publik di negara Jepang dengan meluaskan definisi Hansen dengan menambah sistem komunikasi. Tidak adanya fasilitas ini dalam satu wilayah akan mengakibatkan berkurangnya "efisiensi produktif" dari suatu populasi. Ini merupakan sejumlah karakteristik yang sangat substansial yang membedakan negara-negara saat ini.

2.3.1 Karakteristik Infrastruktur

Infrastruktur adalah bagian dari *capital stock* suatu negara, yaitu sosial *overhead capital* yang mendukung *directly productive capital*. Menurut World Bank dalam World Development Report (1994:2), yang termasuk infrastruktur antara lain :

- a. *Public Utilities*, yaitu energi, telekomunikasi, ppa pensuplai air, sanitasi dan saluran air (selokan), pembuang limbah / kotoran dan pipa gas;
- b. *Public Work*, yaitu jalan, dam, kanal, irigasi, drainase serta transportasi.

2.3.2 Keterkaitan antara Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Easterly dan Rebelo (1993) menemukan pengaruh positif investasi di bidang transportasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Canning, Fay, dan Perotti (1994) menemukan pengaruh positif dari jumlah panjang jalan dan kapasitas listrik terhadap pertumbuhan secara berkelanjutan. Jayme et al, (2009) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengeluaran di bidang infrastruktur berpengaruh secara positif terhadap kinerja makro ekonomi suatu negara. Kenaikan biaya pengeluaran di bidang infrastruktur mengurangi biaya produksi perusahaan dan sebagai konsekuensinya, menstimulasi investasi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Argumen yang ada adalah, pemerintah tidak menciptakan lapangan kerja secara langsung namun membantu menciptakan suasana kondusif dalam investasi privat dan produksi pada level yang kompetitif. Dengan kata lain, investasi publik memiliki potensi untuk menstimulasi investasi privat. Sebagai kesimpulan, peningkatan dalam pengeluaran publik yaitu di bidang infrastruktur untuk sektor-sektor strategis terutama transportasi adalah sesuatu yang penting dan produktif.

Boopen (2006) menemukan bahwa kapital transportasi merupakan kontributor kemajuan ekonomi di negara-negara Sub Sahara Afrika. Auscher (1989c) menemukan bahwa investasi publik berpengaruh terhadap produktivitas dan pertumbuhan. Selanjutnya di tahun 1995, Auscher kembali mengemukakan dalam penelitiannya bahwa stok kapital publik yang bersifat non-militer berkontribusi terhadap pertumbuhan. Nourzad dan Vrieze (1995) meneliti panel data 7 negara OECD tentang pengaruh investasi publik terhadap output. Mereka menemukan bahwa terdapat elastisitas output yang rendah namun signifikan dalam kaitannya dengan investasi publik. Canning (1999) menemukan bahwa elastisitas output sebesar 0.37 terhadap kapital fisik. Ford dan Poret (1991) menggunakan data stok kapital publik non-militer pada 11 negara OECD menemukan bahwa infrastruktur (listrik, gas, air, transportasi dan komunikasi)

memiliki efek signifikan terhadap produktivitas dan output. Taylor & Lewis (1993) menemukan bahwa infrastruktur fisik publik tidak memiliki signifikansi terhadap output.

Penelitian Boopen (2006) menerangkan bahwa kapital transportasi memiliki level produktivitas tertinggi dibanding dengan jenis investasi lainnya. Sehingga menjadikan kapital transportasi sebagai variabel yang produktif atau berpengaruh.

Binswanger dan lainnya (1989 dalam De dan Ghosh, 2005:95) menunjukkan bahwa pengaruh utama dari jalan di pedesaan tidak tertuju pada infrastruktur privat namun melalui marketing dan distribusi dan juga melalui pengurangan biaya transaksi pada komoditas pertanian. Namun, listrik dan infrastruktur pedesaan lainnya memiliki pengaruh langsung terhadap investasi privat dalam pompa listrik (Barnes dan Binswanger, 1986 dalam De dan Ghosh, 2005:95). Elhance dan Lakshmanan (1988 dalam De dan Ghosh, 2005:95), menggunakan infrastruktur fisik dan sosial menunjukkan bahwa penurunan biaya produksi dalam manufaktur diakibatkan dari investasi infrastruktur. Dalam studi yang lebih mendetail, Datt dan Ravallion (1998 dalam De dan Ghosh, 2005:95) membuktikan bahwa suatu daerah yang memulai dengan infratraktur dan SDM yang lebih baik dibanding lain memiliki tingkat penurunan kemiskinan yang jangka panjang. Ghosh dan De (2000) dalam De dan Ghosh, 2005:95), dengan menggunakan fasilitas infrastruktur pada negara Asia Selatan selama dua dekade, menunjukkan bahwa perbedaan dana dalam infrastruktur fisik bertanggung jawab pada naiknya perbedaan secara regional. Sahoo dan Saxena (1999 dalam De dan Ghosh, 2005:95) menggunakan pendekatan fungsi produksi, menyimpulkan bahwa transportasi, listrik, gas dan suplai air dan fasilitas komunikasi memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara simultan memiliki pendapatan dengan skala yang meningkat. Pembangunan fasilitas infrastruktur tambahan di tahap awal dapat memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap pendapatan.

Vu Le (2005) melakukan kajian terhadap pengaruh antara *foreign direct investment* (FDI) dan pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk membuktikan hipotesisnya Le (2005) menggunakan data 105 negara maju dan

berkembang dengan analisis data panel. Data diperoleh dari Worldbank Development Indicator (WDI). Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada Negara maju variabel FDI dan pengeluaran publik berpengaruh lebih besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara berkembang, namun secara parsial variabel FDI dan pengeluaran publik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

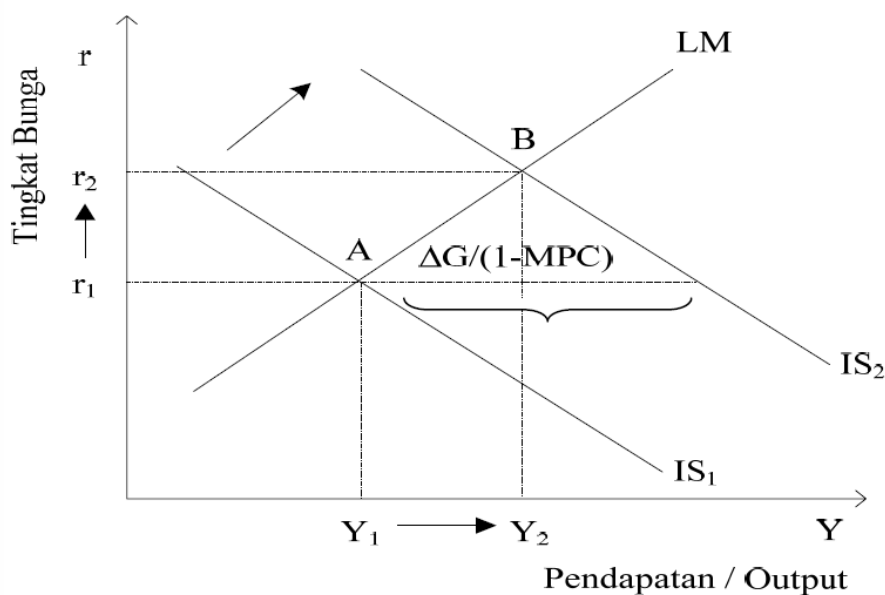
2.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output keseimbangan dengan menambah atau mengurangi pengeluarannya. Besarnya efek perubahan pengeluaran pemerintah adalah sama dengan pengaruh perubahan investasi atau konsumsi otonomus (C_0), sehingga dampak perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian dapat ditulis sebagai berikut :

$$\Delta Y = \Delta G / (1 - b), \text{ dimana } b = \text{Marginal Propensity to Consume (MPC)}$$

Perubahan kebijakan fiskal (belanja pemerintah dan pajak) akan mengubah ekuilibrium jangka pendek perekonomian. Perubahan fiskal ini akan mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS. Model IS-LM menunjukkan bagaimana pergeseran dalam kurva IS ini memengaruhi pendapatan nasional dan tingkat bunga. Kenaikan dalam belanja pemerintah misalnya terjadi sebesar ΔG . Pengganda belanja pemerintah (the government-purchases multiplier) dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa, pada tingkat bunga berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan pendapatan sebesar $\Delta G / (1 - MPC)$. Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2.1. Kurva IS-LM.

IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, kenaikan belanja meningkat



Sumber: Dornbusch 2004

Gambar 2.1 Kenaikan pengeluaran pemerintah dalam model IS-LM

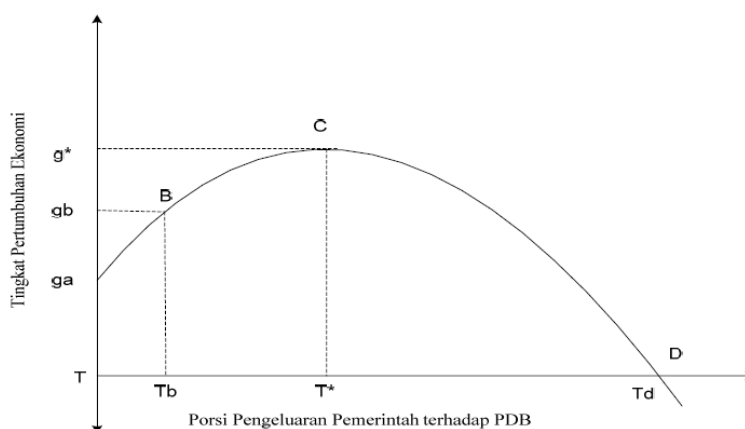
Pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada kegiatan yang relatif bersifat investasi, maka pemerintah telah menciptakan semacam input baru dalam proses produksi secara eksternal yang selanjutnya akan mendorong kegiatan usaha pada tingkat perusahaan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat agregat (Barro 1990). Model Barro diasumsikan bahwa aktivitas pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Diketahui fungsi produksi Cobb Douglas sebagai berikut :

$$Y = f(\mathbf{k}, \mathbf{g}) = A\mathbf{k}^{1-\alpha}\mathbf{g}^{\alpha}$$

Dimana \mathbf{g} adalah kuantitas barang dan jasa per kapita yang dibeli oleh pemerintah yang diasumsikan tidak ada pungutan biaya apapun (*user charges*). Y adalah output perkapita, dan \mathbf{k} adalah stok modal perkapita serta diasumsikan fungsi produksi mempunyai skala pengembalian tetap (*constant return to scale*).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah juga digambarkan oleh kurva Scully yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gerald Scully dalam Chao(1997), yang menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Model kuadrat yang diformulasikan Scully, pengeluaran pemerintah menjadi variabel

independent dan pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dependent. Model dapat disimpulkan bahwa: peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap PDB sampai pada tingkat tertentu memberikan pengaruh yang lebih tinggi pada pertumbuhan, namun pada tingkat yang lebih tinggi lagi (melebihi tingkat optimal) maka pengeluaran pemerintah semakin besar akan berdampak lebih rendah bahkan dapat mencapai nol. Secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Chao 1997

Gambar 2.2 Hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan porsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB

2.5 Otonomi Daerah

Gambaran utuh tentang otonomi daerah tentulah berhubungan langsung dengan sistem kenegaraan yang melahirkan sistem pemerintahan. Sistem kenegaraan (*nations system*) yang dapat memunculkan aneka sistem pendukungnya seperti sistem pemerintahan adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Sistem pemerintahan pada saatnya pula melahirkan adanya konsepsi otonomi daerah sebagai satu diantara beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang mengimplementasikan otonomi daerah melahirkan adanya pemerintahan daerah (*local government*).

Runtutan sistem kenegaraan, sistem pemerintahan, otonomi daerah dan pemerintahan daerah merupakan pertautan yang saling menjelaskan karena ketersambungannya. Hal ini dapat disimak dengan mengikuti alur pikir Magill, Frank. M. N (1996) yang menyebutkan bahwa

“Nations typically have either unitary or federal systems of government. Within a unitary system, all local and regional governments are sub-ordinate to a central government. In a federal system, local and regional government are not fully subordinate to a central government”.

Dijelaskannya, bahwa tipikal negara adalah salah satu dari sistem pemerintahan, kesatuan atau federal. Melalui sistem (negara) kesatuan, semua pemerintahan regional dan (pemerintahan) lokal adalah subordinasi kepada satu pemerintah pusat. Pada sistem negara federal, pemerintahan regional dan pemerintahan lokal tidaklah penuh menjadi subordinasi pemerintah pusat.

Konsepsi yang memilah tegas dan pasti adanya negara kesatuan dengan negara federal tentunya dapat saja dielaborasi lanjut. Adanya wewenang dan bidang tugas yang dilakukan pemerintahan regional maupun pemerintahan lokal yang tidak disubordinasikan ke pemerintah pusat pada negara kesatuan merupakan alternative kemungkinan yang dapat saja terjadi. Hal ini sebagai konsekuensi dari (1) banyaknya jenis wewenang dan bidang tugas pemerintahan lokal serta (2) adanya negara kesatuan dengan luas negara yang begitu luas.

Banyaknya jenis wewenang dan bidang tugas pemerintahan apalagi yang hanya memiliki konteks lokal tertentu, menjadi pembenar adanya keperluan adanya jenis wewenang dan bidang tugas pemerintahan lokal yang tidak efisien

dan efektif bila senantiasa di subordinasikan ke pemerintah pusat. Karenanya negara kesatuan yang menyatakan bahwa tidaklah semua wewenang dan bidang tugas pemerintahan lokal harus di subordinasikan ke pemerintah pusat menjadi suatu keniscayaan saja.

Begitu juga dengan adanya negara kesatuan dengan luas wilayah negara yang luas dan jumlah penduduk yang cukup memadai. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lahir dari adanya wewenang dan tugas pemerintahan menjadi pembayar adanya urusan pemerintahan yang harusnya dikelola dalam lingkup lokal. Lahirnya urusan pemerintahan yang hanya dikelola dalam konteks lokal demi efisiensi dan efektivitasnya, menjadikan urusan itu menjadi urusan pemerintahan lokal.

Karena itu lahirnya pemerintahan lokal yang tidak sepenuhnya bersubordinasi ke pemerintah pusat, termasuk di negara kesatuan sekalipun disamping di negara federal. Berarti tipikal negara berdasarkan sistem pemerintahannya tidaklah hanya (1) negara federal, dan (2) negara kesatuan, tetapi juga (3) negara kesatuan dengan pemerintahan lokal yang tidaklah sepenuhnya bersubordinasi ke pemerintah pusat untuk urusan pemerintahan tertentu atau yang telah ditentukan.

Berarti yang dapat memunculkan adanya pemerintahan lokal bukanlah hanya negara federal semata. Negara kesatuan dengan pemerintahan lokal yang tidak sepenuhnya bersubordinasi ke pemerintah pusat, juga memperlihatkan adanya urusan pemerintahan yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintahan lokal.

Pemerintahan lokal, layaknya haruslah memiliki karakter khusus sebagai pembedanya dengan pemerintahan pusat (negara). Stoker, Gery (1991) menyatakan bahwa

“The essential characteristic of much local government is its concern with making decisions and undertaking actions on the ground. The production of goods, services and actions is the daily concern of local government”.

Karakteristik esensial dari beberapa pemerintahan lokal adalah perhatiannya dengan pembuatan kebijakan dan melakukan aksi pada (lapisan) dasar (masyarakat). Produksi barang dan jasa dan melakukan aksi-aksi adalah perhatian sehari-hari dari pemerintahan lokal. Pemerintahan lokal dengan karakteristik

esensialnya itu, pada masa depan baik dinegara federal atau dinegara kesatuan tertentu melahirkan sejumlah isu berkenaan dengan kehadiran pemerintahan lokal itu sendiri.

Sekarangnya terdapat beberapa isu yang bersangkutan dengan apa dan bagaimana pemerintahan lokal dimasa mendatang. Stoker, Gery (1991) menyebutkan bahwa masa depan pemerintahan lokal berkaitan dengan (1) *the first is the questions of finance* (2) *a second set of issues deal with the structure, size and functions of local government* (3) *a thir issues is a desire to re-establish a stable and agreed basis for central-local relations* (4) *a fourth set of issues relate to local accountability and democracy* (5) *a fifth set of issues realtes to how to manage and organize service delivery and* (6) *the role of local government in confronting some of the key, strategic issues facing society.*

Karena itu bila dielaborasi lebih lanjut, maka masa depan pemerintahan lokal sangatlah ditentukan oleh beberapa hal. Implementasi otonomi daerah sebagai suatu variable pastilah memiliki sejumlah indikator yang menunjukkan keberadaannya. Dengan tetap memperhatikan tantangan masa depan pemerintahan lokal seperti telah disebutkan terdahulu, maka indikator dari implementasi otonomi daerah adalah (1) keuangan daerah (2) struktur, ukuran dan fungsi pemerintahan daerah (3) relasi pusat – daerah (4) akuntabilitas lokal dan demokratisasi ditingkat lokal (5) pelayanan pemerintahan daerah dan (6) isu kunci dan isu strategi pemerintahan daerah.

Tantangan masa depan pemerintahan lokal seperti disebut diatas, muncul karena adanya prinsip otonomi daerah baik di negara federal maupun di negara kesatuan. Prinsip otonomi daerah yang melahirkan adanya pemerintahan lokal menghadapi sejumlah tantangan yang menghadang implementasi otonomi daerah.

Sejatinya, otonomi daerah merupakan konsepsi global dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menumbuhkan adanya pemerintahan lokal. Sebagai konsepsi global, otonomi (daerah) tentunya memiliki pemaknaan global pula. Pemaknaan global tentang otonomi itu menyatakan bahwa otonomi adalah kadar dari determinasi sendiri atau control politis yang dipunyai oleh kelompok minoritas, divisi territorial atau unit politik dalam relasinya dengan negara atau

komunitas politik dimana bentuknya sebagai suatu bagian dan meluas dari pemerintahan lokal sendiri kepada kemerdekaan penuh.

Acuan makna dari otonomi yang berskala global tersebut menunjukkan bahwa yang dimungkinkan untuk berotonomi adalah kelompok minoritas, divisi territorial dan unit politik tertentu serta komunitas politik. Sekaligus menjelaskan bahwa tersedia alternative kemungkinan bahwa pemerintahan lokal sendiri dapat memuarakan diri sebagai kemerdekaan penuh.

Tentu saja makna dari otonomi yang global itu, belum dan tidaklah sepenuhnya cocok untuk diterapkan dalam konteks khusus atau lokal kenegaraan. Karakteristik setiap negara dalam berotonomi, menjadi penentu sejauh mana konsepsi global otonomi itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi nyata negara yang bersangkutan.

Setidaknya untuk konteks khusus Indonesia, acuan makna dari otonomi yang bersifat global itu tidaklah sepenuhnya diserap oleh sistem pemerintahan berotonomi yang diterapkan. Hal ini sepenuhnya dilandasi oleh acuan otonomi khas Indonesia yang menyebutkan secara pasti bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Berdasarkan acuan yuridis formal itu, langsung terbaca bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban. Artinya otonomi daerah dilaksanakan dalam kesejajaran antara hak, wewenang dan kewajiban. Otonomi daerah memang melahirkan adanya hak dari daerah otonom serta wewenang yang melekat sejalan dengan hak yang dipunyai daerah otonom. Dan yang tidak kalah pentingnya, langsung melekat sejumlah kewajiban daerah otonom dalam melaksanakan otonomi daerah yang dipunyainya.

Kalaulah didalami lebih mendasar, otonomi daerah bukanlah memiliki tahap pelaksanaan semata. Sekurangnya dengan menggunakan acuan sederhana yang dilazimkan, otonomi daerah akan memiliki tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan evaluasi. Dengan menggunakan acuan ini, maka

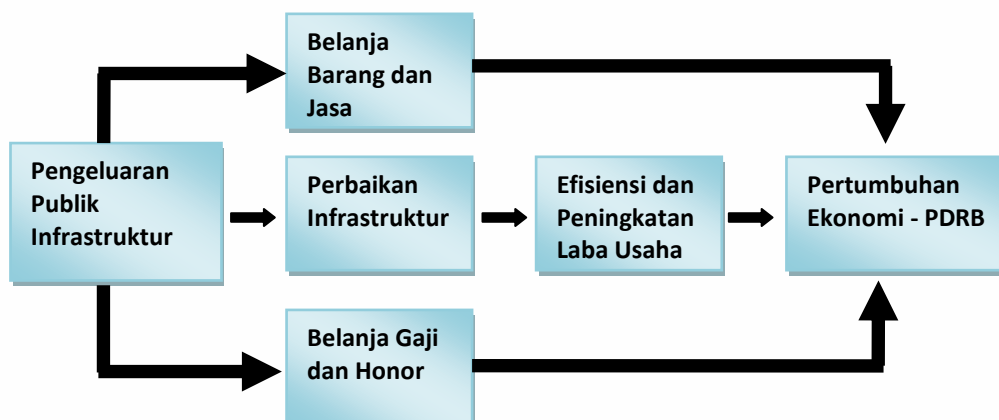
tahap otonomi daerah adalah tahap perencanaan otonomi daerah, tahap implementasi otonomi daerah dan tahap evaluasi otonomi daerah.

Tahap perencanaan otonomi daerah maupun tahap evaluasi otonomi daerah mudah didalami karena eksternalitas realtif tidak begitu banyak. Beda dengan itu, tahap implementasi otonomi daerah adalah tahap krusial karena banyaknya eksternalitas yang mempengaruhi disamping dipola oleh perencanaan otonomi daerah itu sendiri. Konkritnya, pembedaan otonomi daerah pada tahap implementasi adalah bahasan menarik untuk didalami pada dan sekitar otonomi daerah itu sendiri, Rasional inilah yang mengantarkan bahwa yang dijadikan ubahan atau variable pada pendalaman ini adalah implementasi otonomi daerah.

Waluyo (2007) melakukan penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Metode penelitian yang dilakukan adalah model ekonometrika persamaan simultan dengan menggunakan data panel antar provinsi. Ketimpangan pendapatan antar daerah diukur dengan menggunakan indeks tertimbang Williamson. Asumsi utama yang digunakan dalam model penelitian adalah tidak ada migrasi penduduk antar daerah, pergerakan modal dan barang antar daerah. Teknik estimasi yang digunakan adalah Two Stage Least Squared (TSLS). Evaluasi terhadap kualitas model dengan menggunakan RMSE, MAE, MAPE, dan TIC. Data yang digunakan merupakan data atas dasar harga konstan tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relative lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam.

2.6 Studi Terdahulu

Secara umum pengaruh pengeluaran publik untuk infrastruktur fisik terhadap pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kontribusi Pengeluaran Publik Terhadap PDRB

Pengaruh jangka pendek terhadap pertumbuhan dapat berupa kontribusi pengeluaran pemerintah berupa belanja barang, jasa dan honor/gaji terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengaruh jangka panjangnya dapat berupa perbaikan infrastruktur fisik akan meningkatkan efisiensi dunia usaha sehingga meningkatkan perekonomian yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan oleh para ekonom yang meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian penelitian tersebut antara lain dapat dihtisarkan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu terkait dengan pengeluaran publik dan otonomi daerah

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode	Temuan
1	Does government spending spur economic growth in Nigeria?	Maku, Olukayode E. (2009)	Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria menggunakan data time series pada periode 1977-2006	The Classical Least Square (CLS) method	Penelitian menunjukkan hasil bahwa pengeluaran untuk investasi pada infrastruktur publik mempunyai efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian
2	The Nature of Government Expenditure and its Impact on Sustainable Economic Growth	Wadad Saad, Kamel Kalakech (2009)	Studi ini meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan di Lebanon pada periode 1962 – 2007 yang memfokuskan pada pengeluaran sektor keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian	cointegration analysis using Johansen procedure over the period 1962-2007	Pengeluaran kesehatan mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan jangka panjang dan pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan jangka pendek, kemudian pengeluaran untuk sektor pertanian mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan baik jangka panjang maupun jangka pendek
3	The impact of government expenditure on Economic growth in a small caribbean economy: A disaggregated approach	Anton Belgrave and Roland Craigwell Central Bank of Barbados (1995)	Tujuan studi ini adalah membangun model sederhana untuk menunjukkan bagaimana komposisi pengeluaran publik berpengaruh terhadap pertumbuhan	cointegration method	Hasil penelitian mengindikasikan kenaikan pengeluaran modal mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan begitu juga untuk pengeluaran sektor kesehatan, perumahan, pertanian dan jalan. Namun hubungan pengeluaran periode ini dengan pertumbuhan adalah negatif

(Sambungan Tabel 2.1)

4	Linkages between Government Spending, Growth, and Poverty in India and China	Shenggen Fan (2007)	Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memperlihatkan hubungan antara pengeluaran pemerintah - pada sektor penelitian dan pengembangan pertanian, irigasi, pendidikan, dan infrastruktur (termasuk jalan, listrik dan telekomunikasi) – dan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di China dan India	Total Factor Productivity	Hasil penelitian studi kasus menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada investasi yang produktif seperti penelitian dan pengembangan pertanian, irigasi, dan infrastruktur berkontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas pertanian dan menurunkan kesenjangan dan kemiskinan.
5	Pembiayaan Pembangunan Daerah dalam Perekonomian Regional di Indonesia	Purwanto (2008)	Tujuan studi adalah untuk menguji pengaruh pengeluaran belanja modal pemerintah daerah terhadap ekonomi regional di Indonesia menggunakan database statistik 33 provinsi tahun 2007	Cross sectional regression analysis	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang secara signifikan mempengaruhi tingkat pendapatan riil perkapita pada provinsi-provinsi di Indonesia terutama besarnya proporsi belanja modal terhadap pengeluaran daerah
6	Government Spending and economic growth in the European union Countries :An empirical Approach	Marta Pascual dan Santiago Álvarez-García,2006	Menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di 15 Negara Eropa tahun 1994-2000	Model regresi menggunakan panel data	Hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari negara yang menjadi sample penelitian. Untuk Negara-negara maju seperti di Eropa terdapat hubungan yang positif

(Sambungan Tabel 2.1)

7	Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan VAR	Lucky Alfirman dan Edy Sutriyono (2006)	Menguji hubungan kausalitas antara total pengeluaran pemerintah dengan PDB	Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan VAR, data tahun 1970-2003	Terdapat hubungan kausalitas antara total pengeluaran pemerintah dengan PDB. Pengeluaran rutin tidak signifikan memengaruhi PDB karena bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan signifikan terhadap PDB.
8	Economic Growth and Government Size in Indonesia : Some Lessons For the Local Authorities	Arief Ramayandi (2003)	Meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah	Analisis menggunakan The error correction model (ECM)	Menemukan bahwa ukuran pengeluaran pemerintah cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengeluaran pemerintah yang tidak produktif (Cg/Y) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan
9	On Effect of Fiscal Policies in Portugal	Alfredo M Pereira dan Oriof Roca Sagale (2006)	Meneliti pengaruh kebijakan fiskal terhadap output (GDP)	VAR	Investasi pemerintah mempunyai efek positif yang kuat terhadap output, tetapi pajak langsung mempunyai efek negatif yang kuat terhadap output
10	Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries	Niloy Bose, M Emranul, Haque, and Denise R Osborn (2003)	Menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan pada panel data 30 negara berkembang periode 1970-1980		Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan dan positif terhadap output, namun pengeluaran pemerintah periode bersangkutan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

(Sambungan Tabel 2.1)

11	The effects of fiscal decentralization on economic growth in U.S. Counties	Afia Boadiwaa Yamoah, B.Sc. (2007)	Studi adalah untuk meneliti pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi beberapa pemerintah daerah di Amerika Serikat	simultaneous equation models menggunakan multiple regressions.	Semua variabel menunjukkan pengaruh yang beragam terhadap pertumbuhan ekonomi
12	Infrastructure and Long Run Economic Growth	David Canning dan Peter Pedroni (1999)	Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh jangka panjang biaya infrastruktur terhadap pendapatan perkapita	Menggunakan metode panel data beberapa Negara tahun 1950-1992 dengan model analisis regresi linear berganda	Terbukti adanya hubungan yang positif signifikan antara infrastruktur komunikasi dan jalan terhadap kenaikan tingkat pendapatan per kapita
13	Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth	Barro, J Robert (1990)	Study mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah yang tidak produktif terhadap pertumbuhan ekonomi	Equation utility function	Hasil penelitian menunjukkan bagian pengeluaran pemerintah yang tidak produktif (I_g/Y) menunjukkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
14	<i>Fiscal decentralization : It's Impact on Cities Growth</i>	Raksaka Mahi (2001).	meneliti tentang dampak desentralisasi	Menggunakan model ekonometrika simultan <i>two stage least squares model</i>	Hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1)dana alokasi umum lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan yang lainnya walaupun desain kebijakan dana alokasi umum tidak mendukung pemerataan ekonomi antar daerah. (2)Bagi hasil pajak dan bukan pajak menurunkan pertumbuhan ekonomi. (3)Kebutuhan bagi hasil sumber daya alam berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesenjangan antar daerah.

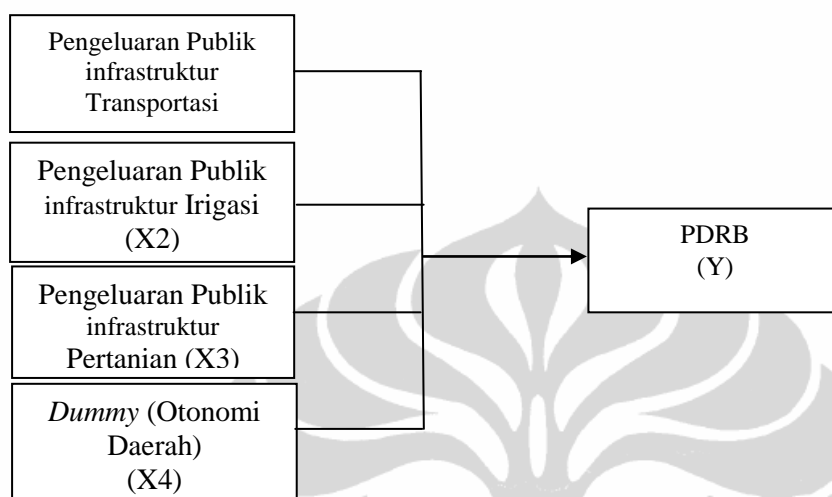
(Sambungan Tabel 2.1)

15	Fiscal Decentralization, Macro-stability, and Growth	Jorge Martinez-Vasquez dan Robert M.McNab (2001)	mengkaji tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi		Dijelaskan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi belum tentu mempunyai dampak secara langsung. Desentralisasi akan mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran atau pembelanjaan publik
16	Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah	Bambang PS Brodjonegoro dan Teguh Dartanto (2003)	mengestimasi dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah	model makro ekonometrik simultan	Hasil analisis diperoleh bahwa, setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal kesenjangan antar wilayah semakin besar antar daerah di Indonesia. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan kerangka teori dan hasil studi terdahulu yang telah dibahas di atas maka dibangun kerangka pemikiran teoritis untuk melakukan analisis pengaruh pengeluaran publik infrastruktur dan otonomi daerah terhadap PDRB enam kabupaten di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1990 – 2008, penelitian ini menggunakan estimasi model sebagai pendekatannya. Model yang akan diestimasi adalah model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik, dimana variabel yang digunakan diambil dari pendekatan model ekonometrik. Model yang ada dikembangkan berdasarkan

beberapa konsepsi, teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dibuat gambaran umum penelitian berupa Kerangka Pemikiran Teoritis sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam pembangunan regional, pengeluaran publik infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, berupa pengeluaran pembangunan dan atau belanja modal dan pemeliharaan. Pengeluaran publik infrastruktur tersebut akan membentuk sinergi yang akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan investasi yang dilakukan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan mengikuti Kerangka Pemikiran Teoritis maka disusun model ekonometrik atau model yang dapat ditaksir dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Dimana ,

$$Y = \text{PDRB}$$

$$\beta_0 = \text{Konstanta}$$

$$\beta_1 = \text{Koefisien } X_1$$

$$\beta_2 = \text{Koefisien } X_2$$

$$\beta_3 = \text{Koefisien } X_3$$

β_4 = Koefisien Dummy

X_1 = Variabel pengeluaran publik infrastruktur transportasi

X_2 = Variabel pengeluaran publik infrastruktur sumber daya air dan irigasi

X_3 = Variabel pengeluaran publik infrastruktur pertanian

X_4 = Variabel Dummy

Dummy = 0 : Sebelum pelaksanaan UU Otonomi Daerah

Dummy = 1 : Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah

Data pada variabel-variabel di atas (X_1 , X_2 , dan X_3) hanya dianalisis dengan menggunakan data dari pemerintah daerah pada saat sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah.

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka dapat dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Pengeluaran publik Infrastruktur Transportasi berpengaruh terhadap PDRB
- H2 : Pengeluaran publik Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi berpengaruh terhadap PDRB
- H3 : Pengeluaran publik Infrastruktur Pertanian berpengaruh terhadap PDRB
- H4 : Dummy kebijakan otonomi daerah berpengaruh terhadap PDRB.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan *explanatory research* yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa (hubungan kausal antara pengeluaran publik dan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi), dan metode deskriptif yaitu meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54). Sedangkan menurut Cooper dan Emory (1996:130) tujuan dari studi deskriptif adalah untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana dan bagaimana dari suatu topik. Studi deskriptif yang paling sederhana menyangkut suatu pertanyaan atau hipotesis univariat dimana kita bertanya mengenai atau menyatakan sesuatu mengenai, besar, bentuk, distribusi, atau keberadaan suatu variabel.

3.2 Desain Penelitian

Untuk menjawab permasalahan penelitian yang dikemukakan pada bab 1, penelitian ini didesain dengan menggunakan metode uji hipotesis, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran infrastruktur (transportasi, sumber daya air dan irigasi, pertanian) dan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan-hubungan fenomena-fenomena yang kompleks (Nazir, 2005:151), sedangkan Trelease dalam Nazir (2005:151) menyatakan hipotesis sebagai suatu keterangan sementara dari fakta yang dapat diamati. Dan Kerlinger dalam Nazir (2005:151), hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terkaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel.

3.3. Variabel Dependen dan Independen

3.3.1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto

Total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). PDRB yang digunakan pada penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1990-2008 (lampiran 2).

3.3.2. Variabel Pengeluaran Publik Infrastruktur Transportasi

Variabel independen yang ditetapkan dalam model penelitian ini adalah variabel pengeluaran publik infrastruktur transportasi. Pengeluaran publik infrastruktur transportasi merupakan kelompok belanja pembangunan dan atau belanja modal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, pelabuhan, dan bandara. Data ini diambil dari realisasi APBD dan Inpres Pembangunan dari enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008 (lampiran 1).

3.3.3. Variabel Pengeluaran Publik Infrastruktur Irigasi

Variabel pengeluaran publik Infrastruktur Irigasi merupakan variabel independen yang menjadi tujuan penelitian ini. Variabel pengeluaran publik Infrastruktur Irigasi merupakan variabel utama yang hendak diuji didalam penelitian ini. Pengeluaran publik infrastruktur Irigasi merupakan pengeluaran publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk belanja modal atau belanja pembangunan sarana dan prasarana irigasi. Peranan irigasi dalam meningkatkan dan menstabilkan produksi pertanian tidak hanya bersandar pada produktivitas saja tetapi juga pada kemampuannya untuk meningkatkan faktor-faktor pertumbuhan lainnya yang berhubungan dengan input produksi. Irigasi mengurangi resiko kegagalan panen karena ketidakpastian hujan dan kekeringan, membuat unsur hara yang tersedia menjadi lebih efektif, menciptakan kondisi kelembaban tanah optimum untuk pertumbuhan tanaman, serta hasil dan kualitas tanaman yang lebih baik. Data ini diambil dari realisasi APBD dan Inpres Pembangunan ddari enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008 (lampiran 1).

3.3.4. Variabel Pengeluaran Publik Infrastruktur Pertanian

Variabel pengeluaran publik Infrastruktur Pertanian merupakan variabel independen yang menjadi tujuan penelitian ini. Variabel pengeluaran publik Infrastruktur Pertanian merupakan variabel utama yang hendak diuji didalam penelitian ini. Pengeluaran publik infrastruktur Pertanian merupakan pengeluaran publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk belanja modal atau belanja pembangunan sarana dan prasarana pertanian seperti. Infrastruktur pertanian berperan dalam meningkatkan dan menstabilkan produksi pertanian yang berhubungan dengan input produksi. Data ini diambil dari realisasi APBD dan Inpres Pembangunan dari enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008 (lampiran 1).

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari enam Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 1990-2008 dan Biro Pusat Statistik (BPS). Data-data tersebut antara lain berupa data:

- a. Data pengeluaran publik tahun 1990-2008 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Periode tahun 2003-2008, data pengeluaran publik diambil dari APBD dan LKPD Pemerintah Daerah
 - b) Periode tahun 1990-2002, data pengeluaran publik selain diambil dari APBD dan LKPD Pemerintah Daerah ditambah data pengeluaran publik untuk infrastruktur yang berasal dari dana Inpres Pembangunan Dati I, Inpres Pembangunan Dati II, Inpres Pembangunan Desa, dan Inpres Peningkatan Jalan.
- b. Data Pengeluaran Publik untuk infrastruktur yang diteliti tidak termasuk data berasal dari pemerintah pusat seperti dari dana dekonsentrasi dan dana yang berasal dari APBD Propvinsi karena suli diperoleh.
- c. Data *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1990-2008.

3.5 Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*), yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengeluaran publik infrastruktur transportasi(X1), pengeluaran publik infrastruktur sumber daya air dan irigasi(X2), pengeluaran publik infrastruktur Pertanian(X3), pelaksanaan otonomi daerah(X4), dan yang menjadi variabel terikat adalah PDRB(Y), untuk melakukan analisis terhadap variabel-variabel di atas, maka perlu dilakukan pengukuran dari setiap variabel tersebut, antara lain:

Data-data tersebut berupa data APBD yang bersumber dari pos pengeluaran pembangunan dan belanja modal, yaitu untuk variabel pengeluaran publik untuk fasilitas transportasi diambil datanya dari belanja modal pengadaan jalan dan jembatan, untuk pengeluaran publik untuk fasilitas sumber daya air dan irigasi diambil datanya dari belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air (bendungan, waduk, kanal, jaringan irigasi), untuk pengeluaran publik untuk fasilitas pertanian diambil datanya dari belanja modal pengadaan tanah pertanian, perkebunan, dan perternakkan, sedangkan untuk data PDRB dari tahun 1990 – 2008 bersumber Biro Pusat Statistik.

3.6 Teknik Sampel

Non probability sampling adalah tehnik pengambilan sample yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample. Tehnik sample ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball (Sugiyono, 2007:66).

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu tehnik penentuan sample dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Sampel penelitian adalah pengeluaran publik pada sektor transportasi, fasilitas sumber daya air dan irigasi, fasilitas pertanian dan pertumbuhan ekonomi di enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 1990-2008.

3.7 Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda, estimasi dilakukan dengan metode PLS (*partial least squared*), efek tetap, dan metode efek random. Selanjutnya, baru dilakukan pengujian atas model tersebut dengan uji Chow, Housman dan uji LM. Setelah ditetapkan model yang tepat dengan uji tersebut, dilakukan pengujian kelayakan model taksiran sehingga diperoleh sifat BLUE. Alat bantu pengolahan data yang digunakan dalam menganalisis model tersebut dengan menggunakan bantuan program software Eviews 7.0.

Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). Persamaan regresinya adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_7 \text{dummy} + \mu$$

$$Y = \text{PDRB}$$

$$\beta_0 = \text{Konstanta}$$

$$\beta_1 = \text{Koefisien } X_1$$

$$\beta_2 = \text{Koefisien } X_2$$

$$\beta_3 = \text{Koefisien } X_3$$

$$\beta_4 = \text{Koefisien Dummy}$$

X_1 = Variabel pengeluaran publik infrastruktur transportasi

X_2 = Variabel pengeluaran publik infrastruktur sumber daya air dan irigasi

X_3 = Variabel pengeluaran publik infrastruktur pertanian

X_4 = Variabel Dummy

Dummy = 0 : Sebelum pelaksanaan UU Otonomi Daerah

Dummy = 1 : Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah

Data pada variabel-variabel di atas (X_1 , X_2 , dan X_3) hanya dianalisis dengan menggunakan data dari pemerintah daerah pada saat sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah

Tahapan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan t_{tabel}

Untuk menentukan t_{tabel} pertama kali ditentukan Df.

Dalam penelitian ini α yang ditentukan adalah 5%. Df diperoleh dari rumus $n-1$ atau jumlah data dikurang 1 (satu). Dalam penelitian ini jumlah data yang digunakan, misal n adalah, sehingga $Df = n - 1$.

b. Menentukan t_{hitung}

Untuk menentukan t_{hitung} dilakukan pengolahan data menggunakan alat bantu program statistik EVIEWS version 7.0.

c. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$: H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$: H_o diterima

d. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Agar model regresi yang digunakan benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representative atau disebut BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) maka model regresi tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik regresi. Pengujian asumsi dasar klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Pengujian Normalitas Data

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda, akan dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap normalitas data. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan uji *Kosmogorov* dan *Smirnov*.

Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di

bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Merupakan situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, yang mana hubungan antara variabel bebas tersebut lebih tinggi dari hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat (Pindyk dan Rubinfeld dalam Kuncoro, 2003). Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi multikolinearitas antara lain dengan metode Koutsoyiannis, mentransformasikan variabel variabel dan memperoleh lebih banyak data. Berdasarkan metode ini, langkah awal yang dilakukan adalah regresi variabel terikat atas setiap variabel bebas yang terkandung dalam suatu model regresi yang sedang diuji. Kemudian dari hasil regresi ini, dipilih salah satu model regresi yang secara apriori dan statistic yang paling meyakinkan. Model regresi yang terpilih ini disebut regresi elementer (*elementary regression*). Selanjutnya dimasukkan satu persatu variabel bebas lainnya untuk diregresikan dalam kaitannya dengan variabel terikat yang telah ditentukan. Hasil regresi yang terjadi diteliti baik mengenai koefisien regresi, standard error yang berkaitan dengan koefisien regresi ini maupun R². Variabel bebas yang baru dimasukkan kedalam percobaan dapat diklasifikasikan sebagai variabel bebas yang berguna (*useful*), tidak perlu (*superfluous*) dan merusak hasil (*detrimental*). Dalam penelitian ini akan digunakan metode VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolieniritas.

c. Heterokedastisitas

Merupakan kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki variance yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya (Hanke dan Reitsch dalam Kuncoro, 2003). Keadaan heterokedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien regresi jadi tidak efisien. Hasil taksiran dapat menjadi kurang dari semestinya, melebihi dai semestinya atau menyesatkan. Dalam penelitian ini dipakai metode gletser test untuk menguji ada tidaknya gejala heterokedastisitas dalam model penelitian ini.

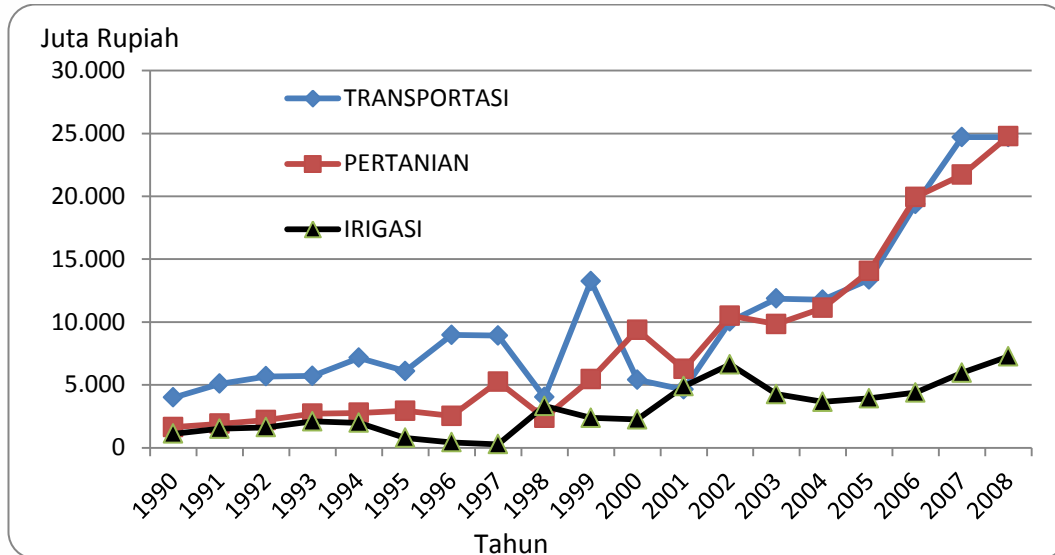
d. Uji Autokorelasi

Adalah korelasi yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu seperti data runtun waktu (*time series data*) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti data silang waktu atau *cross sectional data*) (Kuncoro, 2003). Untuk menguji apakah hasil estimasi model regresi tersebut tidak mengandung korelasi serial diantara *disturbance term*-nya maka dipergunakan metode Durbin Watson Statistik.



BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengeluaran Publik Infrastruktur Transportasi, Pertanian, dan Irigasi



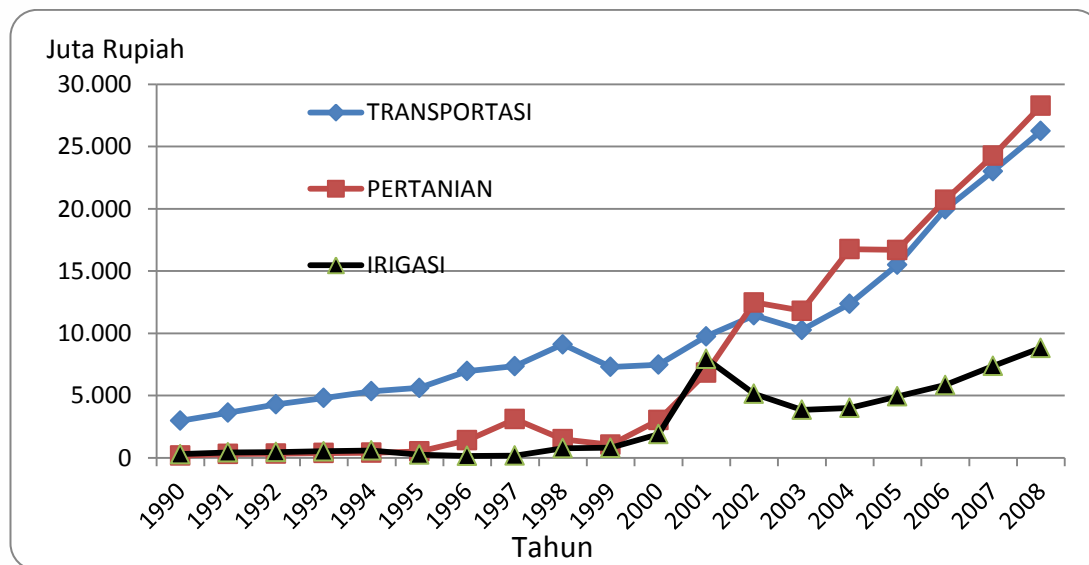
Sumber: LPJ APBD Kabupaten Bima (1990-2008), Inpers Pembangunan (1990-2002)

Gambar 4.1 Grafik Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Bima

Berdasarkan gambar di atas dan data pada lampiran 1, dapat diketahui bahwa pada pengeluaran publik infrastruktur transportasi di Kabupaten Bima memiliki nilai tertinggi atau kenaikan tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 24.702,25. Sedangkan pada tahun 1998 transportasi di Kabupaten ini nampaknya menjadi tahun yang memiliki nilai pengeluaran publik infrastruktur transportasi terendah yaitu sebesar 4.018,51. Namun setelah terjadi penurunan di tahun 1998, transportasi di Kabupaten Bima terjadi pula peningkatan yang cukup drastis pada tahun 1999 dengan nilai sebesar 13.243,33. Setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 1999, kemudian terjadi kembali penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2000 hingga 2001 dengan nilai sebesar 4.636,38 di tahun 2001. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur transportasi pada Kabupaten Bima mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat.

Selanjutnya pengeluaran publik infrastruktur pertanian di Kabupaten Bima, pada tahun 2008 merupakan puncak dari segala hasil pengeluaran publik infrastruktur pertanian dengan mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 24.774,67. Sedangkan pada tahun 1990 merupakan tahun yang mengalami penurunan yang terendah selama periode 1990 – 2008 yaitu dengan nilai sebesar 1.637,80. Kemudian peningkatan yang cukup signifikan juga dapat terlihat pada tahun 1998 sampai 2000 dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2008, kecuali pada tahun 2001 yang mengalami penurunan drastis. Dapat disimpulkan bahwa pertanian pada Kabupaten Bima cukup berfluktuatif dan cenderung meningkat.

Sedangkan pada pengeluaran publik infrastruktur irigasi di Kabupaten Bima, tidak mengalami peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan seperti dua variabel sebelumnya yaitu pengeluaran publik infrastruktur transportasi dan pengeluaran publik infrastruktur pertanian. Dapat dilihat dari hasil gambar diatas bahwa tahun 2008 merupakan tahun yang memiliki nilai irigasi tertinggi pada periode 1990 – 2008 dengan nilai sebesar 7.269,13 sedangkan pada tahun 1997 menjadi tahun yang mengalami penurunan terendah dari tahun-tahun lainnya dalam periode ini yaitu dengan nilai sebesar 271,23. Kenaikan-kenaikan yang terjadi pada pengeluaran publik infrastruktur pertanian irigasi di Kabupaten Bima relatif stabil, artinya tidak terjadi peningkatan yang terlalu signifikan atau tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya, tidak terjadinya penurunan yang sangat signifikan, tetapi pengeluaran publik infrastruktur irigasi pada Kabupaten Bima dapat dikatakan masih memiliki fluktuasi yang cenderung meningkat dan stabil.



Sumber: LPJ APBD Kabupaten Dompu (1990-2008), Inpers Pembangunan (1990-2002)

Gambar 4.2 Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Dompu

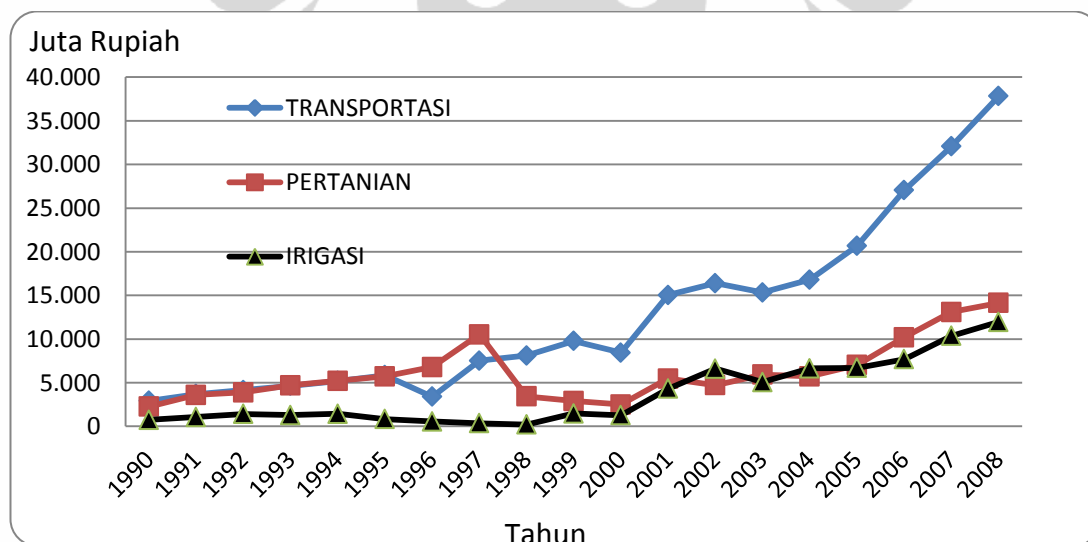
Berdasarkan gambar 4.2 dan data pada lampiran 1, dapat diketahui bahwa pada fasilitas transportasi di Kabupaten Dompu memiliki nilai tertinggi atau kenaikan tertinggi pada tahun 2008 dengan nilai sebesar 26.253,40 namun pada awal tahun penelitian yaitu 1990 merupakan titik terendah pada pengeluaran publik infrastruktur transportasi di Kabupaten Dompu dengan nilai sebesar 2.992,22. Sedangkan penurunan nilai terjadi pada tahun 1999 yaitu mencapai nilai sebesar 7.299,64 yang kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2000 terus mengalami peningkatan hingga sampai puncaknya yaitu pada tahun 2008. Secara keseluruhan nilai yang terdapat pada pengeluaran publik infrastruktur transportasi pada Kabupaten Dompu relatif meningkat.

Selanjutnya pada pengeluaran publik infrastruktur pertanian di Kabupaten Dompu, tahun 2008 nampaknya menjadi tahun yang memiliki nilai tertinggi dari semua tahun pada periode 1990 – 2008 yaitu dengan nilai sebesar 28.277,85 namun sama seperti pengeluaran publik infrastruktur pertanian yakni nilai terendah berada pada awal tahun penelitian yaitu tahun 1990 dengan nilai pengeluaran publik infrastruktur pertanian sebesar 186,21. Sedangkan secara keseluruhan pengeluaran publik infrastruktur pertanian pada Kabupaten Dompu

memiliki nilai yang relatif meningkat, hal tersebut dapat dilihat dengan terus terjadinya peningkatan-peningkatan sejak awal tahun penelitian hingga mencapai puncaknya yaitu pada tahun 2008. Hanya saja ada sedikit penurunan yang terjadi yakni pada tahun 1998 dan 1999 dengan nilai sebesar 1.055,42 pada tahun 1999.

Kemudian pada pengeluaran publik infrastruktur irigasi yang terdapat pada Kabupaten Dompu, tahun 2001 merupakan tahun yang memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 7.956,56. Sedangkan pada tahun 1996 merupakan tahun yang memiliki nilai terendah dari semua tahun pada periode 1990 – 2008 yaitu sebesar 161,23. Berdasarkan data diatas juga dapat disimpulkan bahwa fluktuasi yang terjadi pada pengeluaran publik infrastruktur irigasi di Kabupaten Dompu relatif stabil.

Dari ketiga variabel tersebut, pengeluaran publik infrastruktur irigasi pada Kabupaten Dompu merupakan variabel yang memiliki nilai terendah dengan fluktuasi yang relatif kurang sbila dibandingkan dengan fluktuasi yang terjadi pada pengeluaran publik infrastruktur transportasi dan pengeluaran publik infrastruktur pertanian di Kabupaten Dompu.



Sumber: LPJ APBD Kabupaten Lombok Barat (1990-2008), Inpers Pembangunan (1990-2002)

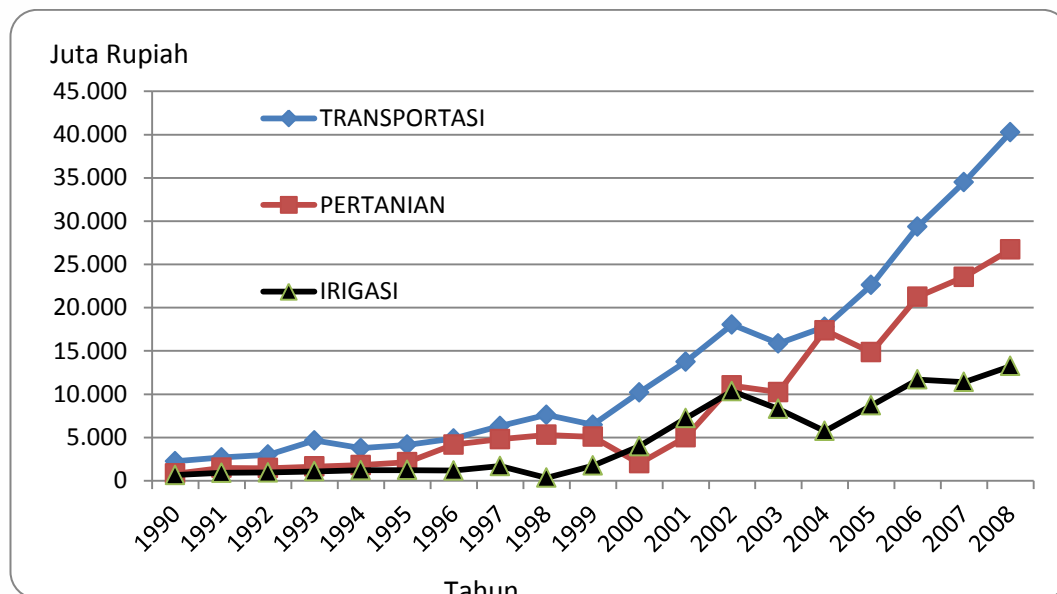
Gambar 4.3 Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kab.Lombok Barat

Berdasarkan gambar di atas dan data pada lampiran 1, dapat diketahui bahwa pada infrastruktur transportasi di Kabupaten Lombok Barat, nilai

pengeluaran publik infrastruktur transportasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan nilai sebesar 37.829,15 namun pada awal tahun yaitu tahun 1990 yang merupakan titik awal tahun penelitian menjadi tahun yang memiliki nilai sebesar 2.916,53. Hasil tersebut merupakan nilai terendah sepanjang periode 1990 – 2008 pada pengeluaran publik infrastruktur transportasi di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan penurunan-penurunan lainnya mulai terjadi pada tahun 1996 yaitu mencapai nilai 3.390,39 dan juga pada tahun 2000 dengan nilai sebesar 8.436,72. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur transportasi pada Kabupaten Lombok Barat cukup berfluktuatif namun cenderung meningkat.

Selanjutnya pada pengeluaran publik infrastruktur pertanian, tahun 2008 merupakan tahun emas bagi pertanian di Kabupaten Lombok Barat, hal ini dapat dinyatakan demikian karena tahun ini memiliki nilai pertanian tertinggi pada periode 1990 – 2008 yaitu sebesar 14.147,38. Berbeda dengan tahun 2008, tahun 1990 yang merupakan tahun awal dilakukannya penelitian merupakan tahun yang memiliki nilai pertanian terendah yaitu dengan nilai sebesar 2.256,52 namun terus beranjak naik pada tahun-tahun selanjutnya dan mulai terjadi fluktuasi pada tahun 1998 hingga tahun 2008. Pada tahun 1998 dapat dikatakan juga sebagai tahun yang memiliki nilai relatif rendah, karena terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa fluktuasi yang terjadi pada pengeluaran publik infrastruktur pertanian ini terbilang cukup stabil.

Selanjutnya pengeluaran publik infrastruktur irigasi pada Kabupaten Lombok barat, tahun 2002 menjadi tahun emas untuk variabel ini. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena tahun 2002 merupakan tahun yang memiliki nilai pengeluaran publik infrastruktur irigasi tertinggi yaitu sebesar 16.611,04. Sedangkan pada tahun 1998 merupakan tahun yang dapat dikatakan memiliki nilai pengeluaran publik infrastruktur irigasi terendah, hal tersebut dapat dilihat dengan perolehan nilai pada tahun ini yaitu sebesar 202,91. Sama seperti pengeluaran publik infrastruktur pertanian, pengeluaran publik infrastruktur irigasi pada Kabupaten Lombok Barat juga memiliki fluktuasi yang relatif meningkat dan stabil.



Sumber: LPJ APBD Kabupaten Lombok Tengah (1990-2008), Inpers Pembangunan (1990-2002),

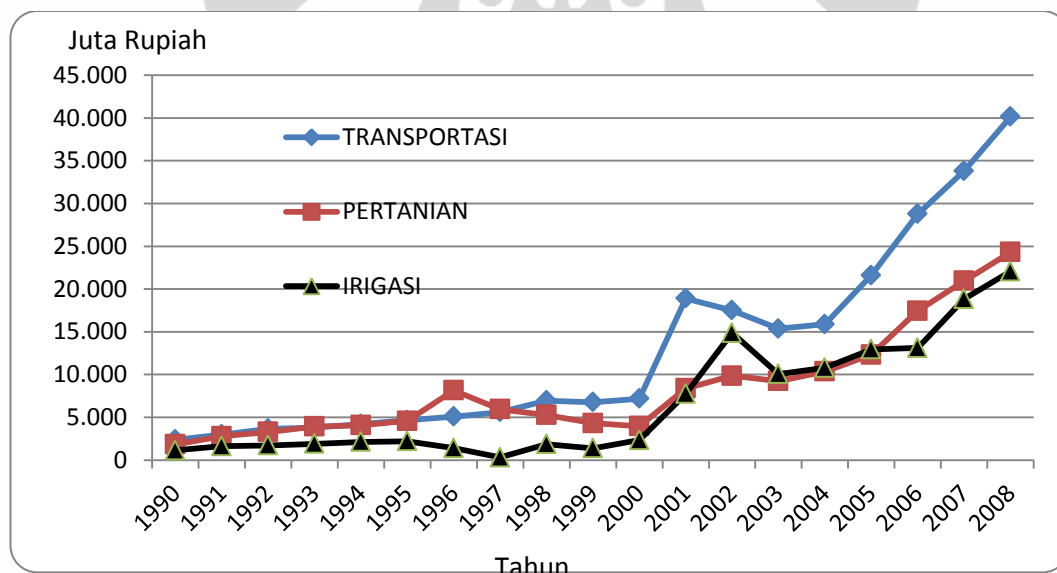
Gambar 4.4 Pengeluaran Publik Infrastruktur Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan gambar di atas dan data pada lampiran 1, dapat diketahui bahwa pada fasilitas transportasi di Kabupaten Lombok Tengah, nilai pengeluaran publik infrastruktur transportasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan nilai sebesar 40.273,45 namun pada awal tahun yaitu tahun 1990 yang merupakan titik awal tahun penelitian menjadi tahun yang memiliki nilai sebesar 2.252,21. Hasil tersebut merupakan nilai terendah sepanjang periode 1990 – 2008 pada pengeluaran publik infrastruktur transportasi di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian penurunan juga terjadi pada tahun 2003 sebesar 15.850,90. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur transportasi pada Kabupaten Lombok Tengah cukup berfluktuatif dan cenderung meningkat, dapat dikatakan meningkat karena berdasarkan gambar 4.4 pada setiap tahunnya relatif terjadi kenaikan nilai pengeluaran publik infrastruktur transportasi.

Selanjutnya pada pengeluaran publik infrastruktur pertanian, tahun 2008 merupakan tahun yang memiliki nilai tertinggi dalam pengeluaran publik infrastruktur pertanian di Kabupaten Lombok Tengah, hal ini dapat dinyatakan demikian karena pada tahun tersebut nilai pengeluaran publik infrastruktur pertanian merupakan yang tertinggi pada periode 1990 – 2008 yaitu sebesar 26.719,02. Berbeda dengan tahun 2008, tahun 1990 yang merupakan tahun awal

dilakukannya penelitian pengeluaran publik infrastruktur pertanian, tahun 1990 ini adalah tahun yang memiliki nilai pengeluaran publik infrastruktur pertanian terendah yaitu dengan nilai sebesar 814,15. Namun demikian mulai terjadi peningkatan pada tahun 2001 yang merupakan peningkatan pengeluaran publik infrastruktur pertanian yang pertama selama periode 1990 -2008 dan kemudian terus mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat.

Selanjutnya pengeluaran publik infrastruktur irigasi pada Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2002 menjadi tahun terbaik untuk pengeluaran publik infrastruktur Pertanian. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena tahun 2002 merupakan tahun yang memiliki nilai pengeluaran publik infrastruktur irigasi tertinggi yaitu sebesar 10.343,67. Sedangkan pada tahun 1998 merupakan tahun yang dapat dikatakan memiliki nilai terendah, hal tersebut dapat dilihat dengan perolehan nilai pengeluaran publik infrastruktur pertanian pada tahun ini yaitu sebesar 331,53. Pengeluaran publik infrastruktur irigasi pada Kabupaten Lombok Tengah cenderung berfluktuatif, hal tersebut dapat dilihat dari gambar 4.4, yang mana pada gambar tersebut terjadi kenaikan setiap tahunnya.



Sumber: LPJ APBD Kabupaten Lombok Timur (1990-2008), Inpers Pembangunan (1990-2002)

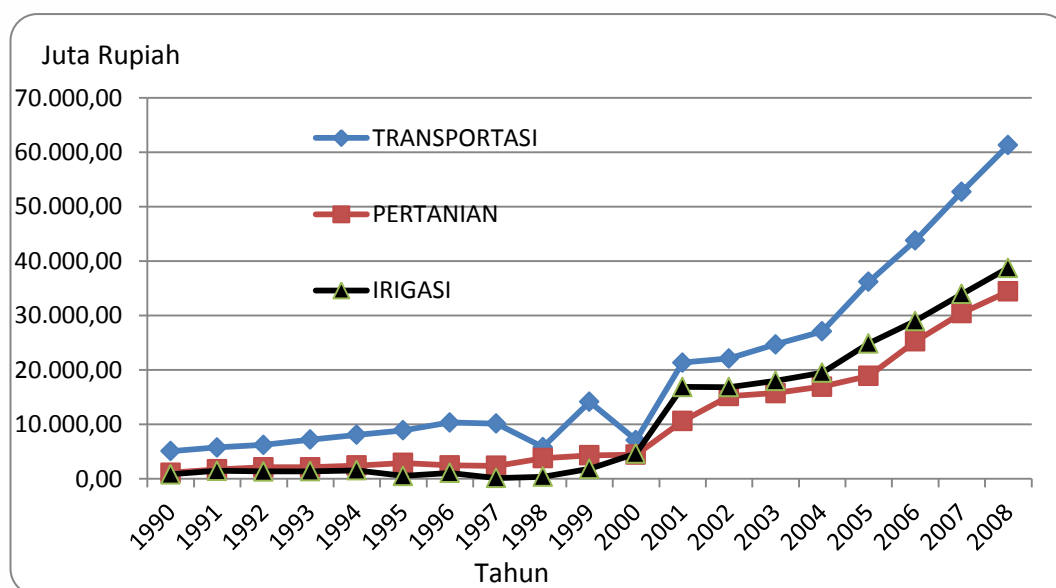
Gambar 4.5 Pengeluaran Publik Infrastruktur Kab. Lombok Timur

Berdasarkan gambar dan tabel di atas dan data pada lampiran 1, dapat diketahui bahwa pada fasilitas transportasi di Kabupaten Lombok Timur, nilai

pengeluaran publik infrastruktur transportasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan nilai sebesar 40.144,70 namun pada awal tahun yaitu tahun 1990 yang merupakan titik awal tahun penelitian menjadi tahun yang memiliki nilai sebesar 2.384,97. Hasil tersebut merupakan nilai terendah sepanjang periode 1990 – 2008 pada pengeluaran publik infrastruktur transportasi di Kabupaten Lombok Timur. Dari seluruh tahun pada periode ini, tahun 2001 merupakan tahun yang memiliki kenaikan nilai pengeluaran publik infrastruktur transportasi paling signifikan yaitu mencapai 18.894,79. Hal tersebut juga menambahkan bahwa pada pengeluaran publik infrastruktur transportasi tertinggi mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat pada Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya pada pengeluaran publik infrastruktur pertanian, tahun 2008 merupakan tahun yang memiliki nilai tertinggi dalam pengeluaran publik infrastruktur pertanian di Kabupaten Lombok Timur, hal ini dapat dinyatakan demikian karena pada tahun tersebut nilai pengeluaran publik infrastruktur pertanian merupakan yang tertinggi pada periode 1990 – 2008 yaitu sebesar 24.321,75. Berbeda dengan tahun 2008, tahun 1990 yang merupakan tahun awal dilakukannya penelitian pengeluaran publik infrastruktur pertanian, tahun 1990 ini adalah tahun yang memiliki nilai pengeluaran publik infrastruktur pertanian terendah yaitu dengan nilai sebesar 1.834,31. Namun demikian mulai terjadi peningkatan pada tahun 2000 yang merupakan peningkatan pengeluaran publik signifikan infrastruktur pertanian yang pertama selama periode 1990 -2008 dan kemudian terus mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat.

Selanjutnya pengeluaran publik infrastruktur irigasi pada Kabupaten Lombok Timur, tahun 2002 menjadi tahun terbaik untuk pengeluaran publik infrastruktur Pertanian. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena tahun 2002 merupakan tahun yang memiliki nilai pengeluaran publik infrastruktur irigasi tertinggi yaitu sebesar 14.869,23 Sedangkan pada tahun 1997 merupakan tahun yang dapat dikatakan memiliki nilai terendah, hal tersebut dapat dilihat dengan perolehan nilai pengeluaran publik infrastruktur pertanian pada tahun ini yaitu sebesar 319,31. Pengeluaran publik infrastruktur irigasi pada Kabupaten Lombok Timur memiliki fluktuasi yang relatif meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari gambar di atas.



Sumber: LPJ APBD Kabupaten Sumbawa (1990-2008), Inpers Pembangunan (1990-2002)

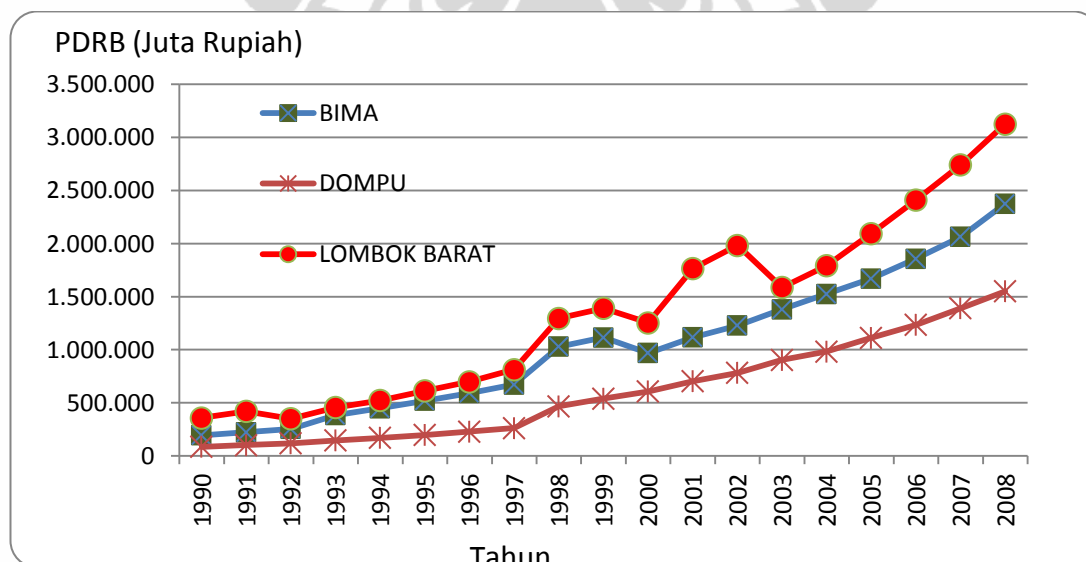
Gambar 4.6 Pengeluaran Publik Infrastruktur Kab. Sumbawa

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada fasilitas transportasi di Kabupaten Sumbawa memiliki nilai tertinggi atau kenaikan tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 61.327,10. Sedangkan pada tahun 1990 merupakan nilai pengeluaran publik infrastruktur transportasi terendah dengan nilai nilai pengeluaran publik infrastruktur transportasi sebesar 5.100,93. Sedangkan peningkatan di tahun 1999 merupakan tahun yang memiliki peningkatan yang signifikan yaitu mencapai nilai nilai pengeluaran publik infrastruktur transportasi sebesar 14.160,47. Sedangkan penurunan-purunan nilai nilai pengeluaran publik infrastruktur transportasi yang terjadi terbilang cukup stabil, karena tidak terdapat penurunan nilai nilai pengeluaran publik infrastruktur transportasi yang signifikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fasilitas transportasi pada Kabupaten Sumbawa berfluktuatif tetapi cenderung meningkat.

Selanjutnya pada pengeluaran publik infrastruktur pertanian, tahun 2008 merupakan tahun yang memiliki nilai tertinggi dalam pengeluaran publik infrastruktur pertanian di Kabupaten Sumbawa, hal ini dapat dinyatakan demikian karena pada tahun tersebut nilai pengeluaran publik infrastruktur pertanian merupakan yang tertinggi pada periode 1990 – 2008 yaitu sebesar 34.444,85.

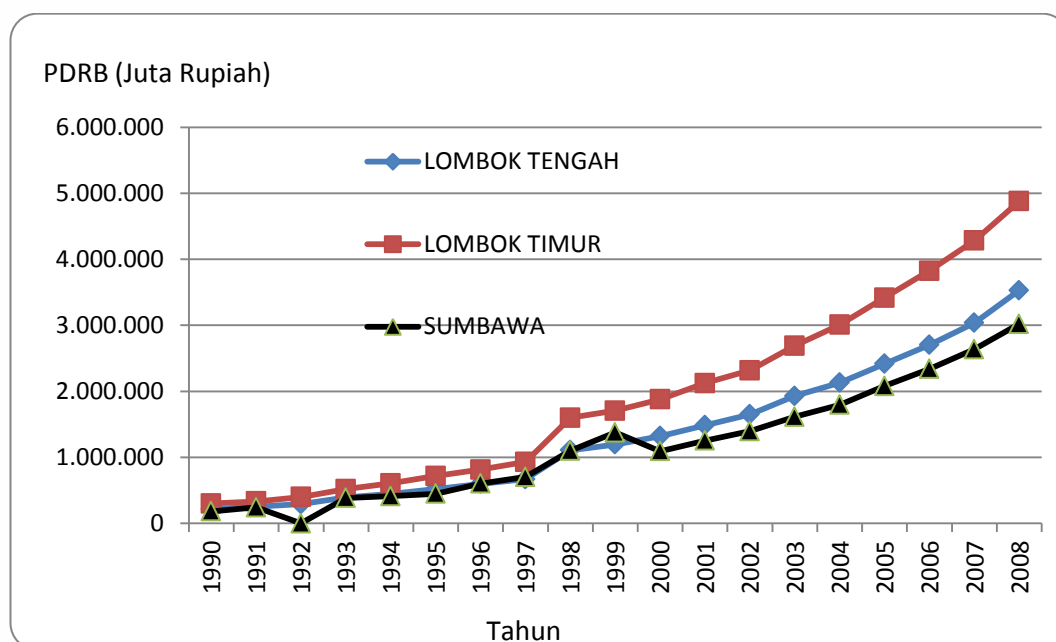
Berbeda dengan tahun 2008, tahun 1990 yang merupakan tahun awal dilakukannya penelitian pengeluaran publik infrastruktur pertanian, tahun 1990 ini adalah tahun yang memiliki nilai pengeluaran publik infrastruktur pertanian terendah yaitu dengan nilai sebesar 1.122.74. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur pertanian mengalami peningkatan yang relatif stabil.

Selanjutnya pengeluaran publik infrastruktur irigasi pada Kabupaten Sumbawa, tahun 2008 juga masih menjadi tahun terbaik untuk pengeluaran publik infrastruktur pertanian. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena tahun 2008 merupakan tahun yang memiliki nilai pengeluaran publik infrastruktur irigasi tertinggi yaitu sebesar 38.756,95. Sedangkan pada tahun 1997 merupakan tahun yang dapat dikatakan memiliki nilai terendah, hal tersebut dapat dilihat dengan perolehan nilai pengeluaran publik infrastruktur pertanian pada tahun ini yaitu sebesar 161,67. Kenaikan yang terbilang signifikan pada periode 1990 – 2008 terjadi di tahun 2001 yaitu mencapai nilai pengeluaran publik infrastruktur irigasi sebesar 16.654,12. Pengeluaran publik infrastruktur irigasi pada Kabupaten Sumbawa memiliki fluktuasi yang relatif meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari gambar di atas.



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (2009)

Gambar 4.7 PDRB Kabupaten Bima, Dompu, dan Lombok Barat



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (2009)

Gambar 4.8 PDRB Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa PDRB pada Kabupaten Lombok Timur merupakan Kabupaten yang memiliki PDRB tertinggi pada tahun 2008 yaitu dengan nilai sebesar 4.879.687. Sedangkan Kabupaten Dompu merupakan Kabupaten dengan nilai PDRB terendah pada tahun 2008 yaitu dengan nilai sebesar 1.551.158. Kabupaten Lombok Barat, dapat dikatakan sebagai Kabupaten yang cukup berfluktuatif tetapi cenderung meningkat dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada Kabupaten Lombok Barat yaitu pada tahun 2002 mencapai nilai sebesar 1.984.184 yang kemudian anjlok pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2003 dengan memperoleh hasil sebesar 1.587.174. Sedangkan pada kabupaten lain, fluktuasi yang terjadi relatif stabil yaitu tidak terjadinya kenaikan atau pun penurunan yang signifikan. Peningkatan yang stabil terlihat pada semua Kabuten yang terdapat pada gambar diatas dan tingkat penurunan juga tampaknya lebih sedikit bila dibandingkan dengan peningkatan-peningkatan yang terjadi.

4.2 Analisis Hasil Uji Regresi

Estimasi berdasarkan hasil uji regresi pooled data Kabupaten Bima pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut,

Tabel 4.1
Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel
Pada Kabupaten Bima

Variabel	Koefisien (β)	t-stat	Prob (t-stat)
Intercept (β_0)	215.503,8	4,659820	0,0000 *
Transportasi (X_1)	17,10792	2,226645	0,0280 *
Pertanian (X_2)	46,80427	5,298182	0,0000 *
Irigasi (X_3)	52,05775	2,814902	0,0058 *
DUMMY	220.965,2	2,930956	0,0041 *
Koef Determinasi (R^2)	0,914424		
F-statistic	291,1814		
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber : hasil perhitungan menggunakan eviews 5.0 (lampiran 3-1)
* signifikan pada level 5%, ** tidak signifikan

Dari tabel di atas maka persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = 215.503,8 + 17,11 X_1 + 46,80 X_2 + 52,06 X_3 + 220.965,2 + \mu$$

Berdasarkan hasil uji regresi pooled diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua variabel yang diujikan yaitu variabel transportasi, pertanian, irigasi, dan dummy pada Kabupaten Bima memiliki nilai signifikansi lebih kecil 0.05. Pada variabel transportasi nilai signifikansi sebesar 0,0280, variabel pertanian sebesar 0,0000, variabel irigasi sebesar 0,0058 dan variabel dummy sebesar 0,0041, yang berarti keempat variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Bima. Sedangkan pada nilai R^2 cukup tinggi yaitu sebesar 0,914424 yang berarti model cukup baik.

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur pada sektor transportasi, pertanian, dan irigasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Bima, sedangkan variabel dummy dengan nilai probabilitas $< 0,05$ menunjukkan bahwa terjadi perbedaan tingkat PDRB yang cukup signifikan pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, nilai koefisien determinasi sebesar 0,914424 menunjukkan besarnya kontribusi transportasi, pertanian, dan irigasi terhadap PDRB Kabupaten Bima sebesar 91,44%, sedangkan sisanya sebesar 8,56% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model, dan untuk sektor pertanian pada Kabupaten Bima

merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi PDRB Kabupaten tersebut. Pengujian secara simultan juga menunjukkan bahwa ketiga sektor publik ini berpengaruh signifikan terhadap PDRB, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F yang lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan analisis menggunakan hasil uji regresi berganda terhadap data pengeluaran publik yang diuji dan PDRB Kabupaten Bima dan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran publik infrastruktur Transportasi berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB
- b. Pengeluaran publik infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB
- c. Pengeluaran publik infrastruktur Pertanian berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB
- d. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh terhadap PDRB

Simpulan tersebut menunjukkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima terhadap pengeluaran publik infrastruktur sudah tepat karena selain berkontribusi langsung terhadap kenaikan PDRB juga memberikan efek multiplier pada kenaikan nilai PDRB. Hal ini juga dapat memberikan gambaran bahwa pengeluaran pemerintah yang selama ini dilaksanakan bersifat produktif dan efektif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bima. Sehingga pemerintah daerah perlu memprioritaskan pengeluaran publik pada sektor transportasi dan pertanian karena kedua sektor ini terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan peningkatan PDRB Kabupaten tersebut. Selain itu, kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan pada Kabupaten Bima terbukti dapat meningkatkan PDRB baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menggambarkan kebijakan pembangunan dan pembiayaan yang diterapkan sudah efektif dan produktif.

Estimasi berdasarkan hasil uji regresi pooled data Kabupaten Dompu pada tabel 4.2 adalah sebagai berikut,

Tabel 4.2
Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel
Pada Kabupaten Dompu

Variabel	Koefisien (β)	t-stat	Prob (t-stat)
Intercept (β_0)	-72.118,19	-1,960039	0,0525 *
Transportasi (X_1)	60,86438	8,171309	0,0000 *
Pertanian (X_2)	-11,99199	-1,639382	0,1040 **
Irigasi (X_3)	-14,51661	-3,011501	0,0032 *
DUMMY	493.515,4	6,313713	0,0000 *
Koef Determinasi (R^2)	0,958319		
F-statistic	626,5242		
Prob(F-statistic)	0,000000		
Sumber : hasil perhitungan menggunakan eviews 5.0 (lampiran 3-2) * signifikan pada level 5%, ** tidak signifikan			

Dari tabel di atas maka persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = -72.118,19 + 60,86X_1 - 11,99 X_2 - 14,52 X_3 + 493.515,4 + \mu$$

Berdasarkan hasil uji regresi pooled diatas, dapat diketahui bahwa variabel transportasi, irigasi, dan dummy pada Kabupaten Dompu memiliki nilai signifikansi lebih kecil 0,05. Pada variabel pertanian memiliki nilai signifikansi sebesar 0.1040, yang mana nilai tersebut berada diatas 0,05, maka variabel tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Dompu. Sedangkan pada variabel transportasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000, variabel irigasi sebesar 0,0032 dan variabel dummy sebesar 0,0000, yang berarti ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten Dompu. Namun perlu diperhatikan bahwa pengaruh sektor irigasi adalah signifikan negatif yang berarti penambahan belanja publik sektor ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi atau PDRB. Sedangkan pada nilai R^2 cukup tinggi yaitu sebesar 0,958319 yang berarti model cukup baik.

Berdasarkan analisis menggunakan hasil uji regresi berganda terhadap data pengeluaran publik dan PDRB Kabupaten Dompu dan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran publik infrastruktur Transportasi berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB
- b. Pengeluaran publik infrastruktur Pertanian berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB.
- c. Pengeluaran publik infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB.
- d. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB

Simpulan tersebut apabila dikaji lebih lanjut menunjukkan kebijakan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur transportasi pada Kabupaten Dompu sudah tepat karena selain berkontribusi langsung terhadap kenaikan PDRB juga memberikan efek multiplier yang signifikan pada kenaikan nilai PDRB, maka Pemerintah Kabupaten Dompu perlu memprioritaskan pengeluaran sektor publiknya pada sektor transportasi sebagai penunjang bagi pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Sebaliknya, kebijakan pengeluaran pemerintah infrastruktur irigasi ternyata tidak produktif karena berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB, sehingga kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali tingkat keefektifannya atau perlu diteliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas pengeluaran publik infrastruktur irigasi. Selain itu, kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan pada Kabupaten Dompu terbukti dapat meningkatkan PDRB baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menggambarkan kebijakan pembangunan dan pembiayaan yang diterapkan sudah efektif dan produktif.

Estimasi berdasarkan hasil uji regresi pooled data Kabupaten Lombok Barat pada tabel 4.3 adalah sebagai berikut,

Tabel 4.3
Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel
Pada Kabupaten Lombok Barat

Variabel	Koefisien (β)	t-stat	Prob (t-stat)
Intercept (β_0)	455.038,1	12,58522	0,0000 *
Transportasi (X_1)	87,50126	19,51566	0,0000 *
Pertanian (X_2)	-48,91108	-5,589789	0,0000 *
Irigasi (X_3)	11,22059	1,691965	0,0935 **
DUMMY	44.935,68	0,530285	0,5970 **
Koef Determinasi (R^2)	0,957199		
F-statistic	609,4186		
Prob(F-statistic)	0,000000		
Sumber : hasil perhitungan menggunakan eviews 5.0 (lampiran 3-3) * signifikan pada level 5%, ** tidak signifikan			

Dari tabel di atas maka persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = 455.038,1 + 87,50 X_1 - 48,91 X_2 - 11,22X_3 + 44.935,68 + \mu$$

Berdasarkan hasil uji regresi pooled diatas, dapat diketahui bahwa semua variabel yang diujikan yaitu variabel transportasi, pertanian, irigasi, dan dummy pada Kabupaten Lombok Barat, tidak semuanya memiliki nilai signifikansi lebih kecil 0,05. Pada variabel transportasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000, variabel pertanian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, berarti kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat, namun karena β_2 bernilai negatif maka pengaruh signifikansi pengaruh pengeluaran publik untuk infrastruktur pertanian adalah negatif artinya penambahan pengeluaran publik ini akan mengurangi PDRB. Sedangkan pada variabel irigasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0935 dan variabel dummy memiliki nilai signifikansi sebesar 0,5970, yang mana kedua nilai tersebut berada lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan pada nilai R^2 cukup tinggi yaitu sebesar 0,957199 yang berarti model cukup baik.

Berdasarkan analisis menggunakan hasil uji regresi berganda terhadap data pengeluaran publik dan PDRB Kabupaten Lombok Barat dan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran publik infrastruktur Transportasi berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB
- b. Pengeluaran publik infrastruktur Pertanian berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB
- c. Pengeluaran publik infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB
- d. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB

Simpulan tersebut apabila dikaji lebih lanjut menunjukkan kebijakan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur transportasi pada Kabupaten Lombok Barat sudah tepat karena selain berkontribusi langsung terhadap kenaikan PDRB juga memberikan efek multiplier yang signifikan pada kenaikan nilai PDRB, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu memprioritaskan pengeluaran sektor publiknya pada sektor transportasi sebagai penunjang bagi pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Sebaliknya, kebijakan pengeluaran pemerintah infrastruktur pertanian ternyata tidak produktif karena berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB, sehingga kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali tingkat keefektifannya atau perlu diteliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas pengeluaran publik infrastruktur pertanian tersebut. Selain itu, kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan pada Kabupaten Lombok Barat terbukti belum dapat meningkatkan PDRB baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menggambarkan kebijakan pembangunan dan pembiayaan yang diterapkan belum efektif dan produktif.

Estimasi berdasarkan hasil uji regresi pooled data Kabupaten Lombok Tengah pada tabel 4.4 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel
Pada Kabupaten Lombok Tengah

Variabel	Koefisien (β)	t-stat	Prob (t-stat)
Intercept (β_0)	274.288,1	9,607893	0,0000 *
Transportasi (X_1)	83,72782	10,17540	0,0000 *
Pertanisan (X_2)	-7,321909	-0,669531	0,5046 **
Irigasi (X_3)	-31,04626	-3,953426	0,0001 *
DUMMY	557.261,7	5,466098	0,0000*
Koef Determinasi (R^2)	0,965512		
F-statistic	762,8831		
Prob(F-statistic)	0,000000		
Sumber : hasil perhitungan menggunakan evIEWS 5.0 (lampiran 3-4) * signifikan pada level 5%, ** tidak signifikan			

Dari tabel di atas maka persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = 274.288,1 + 83,73X_1 - 7,323X_2 - 31,05X_3 + 55.7261,7 + \mu$$

Berdasarkan hasil uji regresi pooled di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua variabel yang diujikan yaitu variabel transportasi, pertanian, irigasi, dan dummy pada Kabupaten Lombok Tengah memiliki nilai signifikansi lebih kecil 0,05. Pada variabel pertanian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,5046, yang mana angka tersebut berada diatas 0,05, maka variabel tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan pada variabel transportasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000, variabel irigasi sebesar 0,0001 dan variabel dummy sebesar 0,0000 yang berarti kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pada PDRB Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan pada nilai R^2 cukup tinggi yaitu sebesar 0,965512 yang berarti model cukup baik.

Berdasarkan analisis menggunakan hasil uji regresi berganda terhadap data pengeluaran publik dan PDRB Kabupaten Lombok Tengah dan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pengeluaran publik infrastruktur Transportasi berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB

- b. Pengeluaran publik infrastruktur Pertanian berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB
- c. Pengeluaran publik infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB
- d. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB

Simpulan tersebut apabila dikaji lebih lanjut menunjukkan kebijakan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur transportasi pada Kabupaten Lombok Tengah sudah tepat karena selain berkontribusi langsung terhadap kenaikan PDRB juga memberikan efek multiplier yang signifikan pada kenaikan nilai PDRB, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu memprioritaskan pengeluaran sektor publiknya pada sektor transportasi sebagai penunjang bagi pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Sebaliknya, kebijakan pengeluaran pemerintah infrastruktur irigasi ternyata tidak produktif karena berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB, sehingga kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali tingkat keefektifannya atau perlu diteliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas pengeluaran publik infrastruktur irigasi. Selain itu, kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan pada Kabupaten Lombok Tengah terbukti dapat meningkatkan PDRB baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menggambarkan kebijakan pembangunan dan pembiayaan yang diterapkan sudah efektif dan produktif

Estimasi berdasarkan hasil uji regresi pooled data Kabupaten Lombok Timur pada tabel 4.5 adalah sebagai berikut,

Tabel 4.5
Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel
Pada Kabupaten Lombok Timur

Variabel	Koefisien(β)	t-stat	Prob (t-stat)
Intercept (β_0)	369047,5	5,523463	0,0000 *
Transportasi (X_1)	105,3683	5,507958	0,0000 *
Pertanian (X_2)	7,951927	0,280333	0,7798 **
Irigasi (X_3)	-14,44946	-1,952759	0,0534 *
DUMMY	541.011,5	3,100183	0,0025 *
Koef Determinasi (R^2)	0,928521		
F-statistic	353,9817		
Prob(F-statistic)	0,000000		
Sumber : hasil perhitungan menggunakan evIEWS 5.0 (lampiran 3-5) * signifikan pada level 5%, ** tidak signifikan			

Dari tabel di atas maka persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = 369.047,5 + 105,37 X_1 + 7,95 X_2 - 14,45 X_3 + 541.011,5 + \mu$$

Berdasarkan hasil uji regresi pooled diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua variabel yang diujikan yaitu variabel transportasi, pertanian, irigasi, dan dummy pada Kabupaten Lombok Timur memiliki nilai signifikansi lebih kecil 0,05. Nilai signifikansi yang terdapat pada variabel pertanian sebesar 0,7798 dan variabel irigasi sebesar 0,0534, yang mana nilai tersebut berada diatas nilai ketentuan, maka dapat dinyatakan bahwa variabel transportasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan pada variabel transportasi nilai signifikansi sebesar 0,0000, dan variabel dummy sebesar 0,0025, hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan pada nilai R^2 cukup tinggi yaitu sebesar 0,928521 yang berarti model cukup baik.

Berdasarkan analisis menggunakan hasil uji regresi berganda terhadap data pengeluaran publik dan PDRB Kabupaten Lombok Timur dan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran publik infrastruktur Transportasi berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB

- b. Pengeluaran publik infrastruktur Pertanian berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB
- c. Pengeluaran publik infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB
- d. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB

Simpulan tersebut apabila dikaji lebih lanjut menunjukkan kebijakan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur transportasi pada Kabupaten Lombok Timur sudah tepat karena selain berkontribusi langsung terhadap kenaikan PDRB juga memberikan efek multiplier yang signifikan pada kenaikan nilai PDRB, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu memprioritaskan pengeluaran sektor publiknya pada sektor transportasi sebagai penunjang bagi pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Sebaliknya, kebijakan pengeluaran pemerintah infrastruktur irigasi ternyata tidak produktif karena berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB, sehingga kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali tingkat keefektifannya atau perlu diteliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas pengeluaran publik infrastruktur irigasi. Selain itu, kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan pada Kabupaten Lombok Timur terbukti dapat meningkatkan PDRB baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menggambarkan kebijakan pembangunan dan pembiayaan yang diterapkan sudah cukup efektif dan produktif.

Estimasi berdasarkan hasil uji regresi pooled data Kabupaten Sumbawa pada tabel 4.6 adalah sebagai berikut,

Tabel 4.6
Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel
Pada Kabupaten Sumbawa

Variabel	Koefisien (β)	t-stat	Prob (t-stat)
Intercept (β_0)	27.1901,1	4,499272	0,0000 *
Transportasi (X_1)	20,46664	1,931089	0,0561 **
Pertanian (X_2)	92,26148	4,456370	0,0000 *
Irigasi (X_3)	-49,43902	-2,536802	0,0126 *
DUMMY	294.290,2	1,814874	0,0723 **
Koef Determinasi (R^2)	0,917700		
F-statistic	303,8550		
Prob(F-statistic)	0,000000		
Sumber : hasil perhitungan menggunakan eviews 5.0 (lampiran 3-6) * signifikan pada level 5%, ** tidak signifikan			

Dari tabel di atas maka persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = 27.1901,1 + 20,47 X_1 + 92,26 X_2 - 49,44 X_3 + 29.4290,2 + \mu$$

Berdasarkan hasil uji regresi pooled di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua variabel yang diujikan yaitu variabel transportasi, pertanian, irigasi, dan dummy pada Kabupaten Sumbawa memiliki nilai signifikansi lebih kecil 0,05. Nilai signifikansi yang terdapat pada variabel transportasi sebesar 0,0561 dan variabel dummy sebesar 0,0723, yang mana nilai tersebut berada di atas nilai ketentuan, maka dapat dinyatakan bahwa variabel transportasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten Sumbawa. Pada variabel pertanian nilai signifikansi 0,0000, dan variabel irigasi sebesar 0,0126, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten Sumbawa. Sedangkan pada nilai R^2 cukup tinggi yaitu sebesar 0,917700 yang berarti model cukup baik.

Berdasarkan analisis menggunakan hasil uji regresi berganda terhadap data pengeluaran publik dan PDRB Kabupaten Sumbawa dan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran publik infrastruktur Transportasi berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB
- b. Pengeluaran publik infrastruktur Pertanian berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB
- c. Pengeluaran publik infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB
- d. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB

Simpulan tersebut apabila dikaji lebih lanjut menunjukkan kebijakan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur transportasi pada Kabupaten Sumbawa sudah tepat karena selain berkontribusi langsung terhadap kenaikan PDRB juga memberikan efek multiplier yang signifikan pada kenaikan nilai PDRB, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu memprioritaskan pengeluaran sektor publiknya pada sektor pertanian sebagai penunjang bagi pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Sebaliknya, kebijakan pengeluaran pemerintah infrastruktur irigasi ternyata tidak produktif karena berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB, sehingga kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali tingkat keefektifannya atau perlu diteliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas pengeluaran publik infrastruktur irigasi. Selain itu, kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan pada Kabupaten Bima terbukti belum dapat meningkatkan PDRB baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menggambarkan kebijakan pembangunan dan pembiayaan yang diterapkan tidak efektif dan produktif.

Estimasi berdasarkan hasil uji regresi pooled semua data seluruh Kabupaten pada tabel 4.7 adalah sebagai berikut,

Tabel 4.7
Ringkasan Hasil Uji Regresi Pengujian Semua Data (OLS)
Pada Seluruh Kabupaten

Variabel	Koefisien (β)	t-stat	Prob (t-stat)
Intercept (β_0)	27.8951,7	3,513250	0,0006 *
Transportasi (X_1)	67,69548	5,642872	0,0000 *
Pertanian (X_2)	-14,58997	-0,981078	0,3287 **
Irigasi (X_3)	-16,25430	-1,295230	0,1980 **
DUMMY	693808,8	4,065362	0,0001 *
Koef Determinasi (R^2)	0,720320		
F-statistic	70,18294		
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber : hasil perhitungan menggunakan eviews 5.0 (lampiran 4)
* signifikan pada level 5%, ** tidak signifikan

Dari tabel di atas maka persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = 27.8951,7 + 67,69 X_1 - 14,59 X_2 - 16,26X_3 + 69.3808,8 + \mu$$

Jika pada pengujian model-model sebelumnya dilakukan pada setiap kabupaten, maka pengujian ini dilakukan pada semua kabupaten, hal ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh faktor pertanian, irigasi, dan transportasi, serta otonomi daerah terhadap PDRB secara keseluruhan dengan menganggap konstan perbedaan yang mungkin terjadi pada setiap kabupaten. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari tiga faktor yang diuji dalam model, hanya faktor transportasi yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap PDRB karena memiliki nilai probabilitas $< 0,05$, sedangkan faktor pertanian dan irigasi tidak terbukti berpengaruh terhadap PDRB karena memiliki nilai probabilitas $> 0,05$. Sementara itu, dilihat dari nilai koefisien determinasi dapat diketahui bahwa faktor transportasi, pertanian, dan irigasi memiliki kontribusinya terhadap perubahan PDRB sebesar 72,03%, sisanya sebesar 27,97% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

Selanjutnya untuk variabel pelaksanaan otonomi daerah terbukti bahwa tingkat PDRB semua kabupaten memang dipengaruhi oleh pelaksanaan otonomi daerah, hal ini berarti terdapat perbedaan PDRB yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah, hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel sektor publik di atas terbukti secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB.

Pengujian model regresi dengan data panel (OLS) yaitu menggabungkan semua data cross sectional dan waktu seperti yang dilakukan pada model sebelumnya, tentu memiliki tingkat akurasi data yang kurang maksimal karena pada realitanya setiap Kabupaten memiliki kemampuan sumber daya keuangan maupun sumber daya alam yang berbeda satu sama lain, sehingga intercept antar Kabupaten tentunya tidak sama. Agar pengujian model regresi lebih valid, maka metode analisis dengan efek tetap dan efek random dapat digunakan pada data panel. Karena data penelitian ini memiliki data waktu yang lebih banyak daripada data panel, maka model penelitian ini akan lebih tepat jika dilakukan dengan model efek tetap, hal ini sesuai dengan pendapat Nachrowi (2006) bahwa untuk penelitian yang memiliki data jumlah waktu lebih besar (T) dibandingkan jumlah individu (N) ($T > N$) maka sebaiknya menggunakan metode efek tetap.

Estimasi berdasarkan hasil uji regresi menggunakan metode efek tetap pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Uji Regresi Variabel Pada Seluruh Kabupaten
Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Variabel	Koefisien (β)	t-stat	Prob (t-stat)
Intercept (β_0)	82,85500	4,432662	0,0000 *
Transportasi (X_1)	77,31794	8,901913	0,0000 *
Pertanian (X_2)	-16,90026	-1,579202	0,1173 **
Irigasi (X_3)	-27,48032	-3,011451	0,0033 *
DUMMY	685370,2	5,569241	0,0000 *
Koef Determinasi (R^2)	0,877603		
F-statistic	82,85500		
Prob(F-statistic)	0,000000		
Sumber : hasil perhitungan menggunakan eviews 5.0 (lampiran 5)			
* signifikan pada level 5%, ** tidak signifikan			

Dari tabel di atas maka persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = 82,85500 + 77,32X_1 - 16,90 X_2 - 27,48 X_3 + 685.370,2 + \mu$$

Hasil dengan pengujian model efek tetap mendapat beberapa temuan nilai R^2 yang didapat lebih tinggi dibandingkan OLS, yaitu sebesar 84.19%. Disamping itu, nilai *Sum of Square Residual* (SSE) pada MET (Metode Efek Tetap) lebih rendah dibandingkan OLS. Dapat dilihat di atas bahwa SEE untuk MET sebesar 1,37, sedangkan untuk OLS sebesar 3,48. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa pada MET variabel bebas transportasi, dan variabel dummy signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$ atau lebih kecil dari 0,05. Artinya transportasi, dan dummy mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

Dari intercept enam Kabupaten juga diperoleh temuan bahwa Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat perubahan PDRB yang paling besar, disusul Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Kabupaten yang memiliki perubahan PDRB paling rendah adalah Kabupaten Bima. Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian (Ghosh, 2005) bahwa pembangunan infrastruktur pada sektor transportasi, irigasi, pertanian, pendidikan, kesehatan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sementara itu, pendapat yang dikemukakan oleh Le (2005) bahwa pengeluaran publik merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi publik juga merupakan faktor yang memberikan kontribusi terhadap akumulasi modal.

Besarnya peran fasilitas transportasi dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditemukan oleh Easterly dan Rebelo (1993) yang menemukan adanya pengaruh positif investasi di bidang transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Canning, Fay, dan Perotti (1994) yang menemukan terdapat pengaruh positif dari jumlah panjang jalan terhadap pertumbuhan secara berkelanjutan. Jayme et al, (2009) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengeluaran di bidang infrastruktur berpengaruh secara positif terhadap kinerja makro ekonomi suatu negara., karena kenaikan biaya pengeluaran di bidang infrastruktur mengurangi biaya produksi perusahaan dan sebagai konsekuensinya, menstimulasi investasi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Argumennya adalah pemerintah tidak menciptakan lapangan kerja secara langsung namun membantu menciptakan suasana kondusif

dalam investasi privat dan produksi pada level yang kompetitif. Dengan kata lain, investasi publik memiliki potensi untuk menstimulasi investasi privat. Sebagai kesimpulan, peningkatan dalam pengeluaran publik yaitu di bidang infrastruktur untuk sektor-sektor strategis terutama transportasi adalah sesuatu yang penting dan produktif.

Boopen (2006) menemukan bahwa kapital transportasi merupakan kontributor kemajuan ekonomi di negara-negara Sub Sahara Afrika. Auscher (1989c) menemukan bahwa investasi publik berpengaruh terhadap produktivitas dan pertumbuhan. Selanjutnya di tahun 1995, Auscher kembali mengemukakan dalam penelitiannya bahwa stok kapital publik yang bersifat non-militer berkontribusi terhadap pertumbuhan. Penelitian Boopen (2006) menerangkan bahwa kapital transportasi memiliki level produktivitas tertinggi dibanding dengan jenis investasi lainnya. Sehingga menjadikan kapital transportasi sebagai variabel yang produktif/berpengaruh.

Hasil beberapa temuan penelitian terdahulu yang menyatakan dominannya pengaruh dari transportasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor publik lainnya sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa transportasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan analisis menggunakan hasil uji regresi berganda terhadap data pengeluaran publik dan PDRB seluruh kabupaten (enam kabupaten) dan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran publik infrastruktur Transportasi berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi
- b. Pengeluaran publik infrastruktur Pertanian berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
- c. Pengeluaran publik infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
- d. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

4.3 Hasil Analisis Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini akan digunakan metode VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas. Analisis ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui dan menunjukkan adanya hubungan linier diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi.

Pengujian Multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung VIF (*Variance Inflationary Factor*) dan Tol (*Tolerance*). Jika nilai VIF diatas 10 dan Tol dibawah 0.10 maka berarti terjadi Multikolinieritas (Alhusin, 2003: 222).

Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan SPSS 12.0 *for windows*, didapat hasil bahwa semua variabel tidak mengalami multikolinearitas. Hasil tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Transportasi	0,136	7,357
	Pertanian	0,188	5,310
	Irigasi	0,263	3,796
	Dummy	0,354	2,824

Sumber: Olah data dengan SPSS *for windows* 12.0

4.3.2 Uji Autokorelasi

Hasil uji persamaan melalui regresi *Ordinary Least Square*, menghasilkan sebuah model yang perlu dilakukan uji autokorelasi (*serial correlation*) dan Heterokedastisitas untuk mengetahui hasil estimasi bersifat BLUE (*best linear unbiased estimates*). Uji autokorelasi dapat menggunakan dua cara, yaitu: uji Durbin Watson dan uji Breusch-Godfrey. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey untuk mengetahui keberadaan autokorelasi pada model.

Dari hasil estimasi regresi antara seluruh variabel bebas dengan volume menghasilkan nilai uji autokorelasi seperti yang tertera pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	86.75234	Prob. F(2,107)	0.0000
Obs*R-squared	70.51410	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 05/31/11 Time: 15:06

Sample: 1 114

Included observations: 114

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4755.623	49622.24	-0.095837	0.9238
TRANS	-7.433562	7.648615	-0.971883	0.3333
PRTAN	19.65149	9.390230	2.092759	0.0387
IRGSI	2.481207	8.199936	0.302589	0.7628
DUMMY	-197234.3	107505.6	-1.834642	0.0693
RESID(-1)	0.708748	0.097559	7.264849	0.0000
RESID(-2)	0.131674	0.100896	1.305054	0.1947
R-squared	0.618545	Mean dependent var		-2.74E-10
Adjusted R-squared	0.597155	S.D. dependent var		525790.7
S.E. of regression	333719.9	Akaike info criterion		28.33343
Sum squared resid	1.19E+13	Schwarz criterion		28.50144
Log likelihood	-1608.005	Hannan-Quinn criter.		28.40162
F-statistic	28.91745	Durbin-Watson stat		1.885911
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olah data dengan EViews 7.0

Hasil uji formal pada data seluruh tahun ini menunjukkan bahwa model mengalami autokorelasi. Hal ini ditunjukkan dari **nilai probability yang jauh lebih kecil dari lima persen.**

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji heterokedastisitas. Salah satu uji yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan uji White.

Dari hasil estimasi regresi antara seluruh variabel bebas dengan volume menghasilkan nilai uji Heteroskedastis seperti yang tertera pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	3.650583	Prob. F(13,100)	0.0001
Obs*R-squared	36.68963	Prob. Chi-Square(13)	0.0005
Scaled explained SS	63.04427	Prob. Chi-Square(13)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 05/31/11 Time: 15:07

Sample: 1 114

Included observations: 114

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.27E+10	1.80E+11	-0.238017	0.8124
TRANS	27695105	28273308	0.979550	0.3297
TRANS^2	-1909.218	1775.725	-1.075177	0.2849
TRANS*PRTAN	3493.640	4145.964	0.842660	0.4014
TRANS*IRGSI	-788.4257	3262.426	-0.241669	0.8095
TRANS*DUMMY	-1806773.	41624119	-0.043407	0.9655
PRTAN	16273233	32621211	0.498854	0.6190
PRTAN^2	-4524.970	2981.029	-1.517922	0.1322
PRTAN*IRGSI	5517.411	5380.223	1.025499	0.3076
PRTAN*DUMMY	23391637	57453496	0.407140	0.6848
IRGSI	30299597	68571198	0.441871	0.6595
IRGSI^2	-2685.393	1362.093	-1.971519	0.0514
IRGSI*DUMMY	29709135	79451500	0.373928	0.7092
DUMMY	-6.59E+11	4.39E+11	-1.501097	0.1365
R-squared	0.321839	Mean dependent var	2.74E+11	
Adjusted R-squared	0.233678	S.D. dependent var	5.34E+11	
S.E. of regression	4.67E+11	Akaike info criterion	56.69233	
Sum squared resid	2.18E+25	Schwarz criterion	57.02835	
Log likelihood	-3217.463	Hannan-Quinn criter.	56.82870	
F-statistic	3.650583	Durbin-Watson stat	0.616970	
Prob(F-statistic)	0.000100			

Sumber: Olah data dengan EViews 7.0

Hasil uji heterokedastisitas White menunjukkan bahwa model mengalami heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dari nilai probability yang lebih kecil dari lima persen.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian pada bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Analisis per kabupaten pada umumnya menunjukkan pengeluaran publik infrastruktur transportasi terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap PRDB hal ini dapat memberi gambaran bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor ini sangat produktif mempengaruhi peningkatan PDRB kabupaten masing-masing. Sedangkan pengeluaran publik infrastruktur irigasi dan pertanian menunjukkan hasil yang bervariasi pengaruhnya terhadap PDRB dan umumnya terbukti berpengaruh signifikan negatif atau bersifat tidak produktif terhadap PRDB .
2. Secara simultan terbukti pengeluaran publik infrastruktur transportasi dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB, sedangkan pengeluaran publik infrastruktur pertanian dan irigasi berpengaruh negatif atau kontraproduktif terhadap kenaikan PDRB.
3. Kontribusi Pengeluaran publik untuk infrastruktur transportasi, pertanian, irigasi dan kebijakan otonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan PDRB sebesar 72,03% sedangkan sisanya sebesar 31,97% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji regresi berganda maka direkomendasikan :

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Disarankan kepada pihak pelaku atau pengambil kebijakan publik pemerintah daerah untuk :

- a. memprioritaskan perencanaan dan penganggaran pengeluaran publik untuk membiayai kegiatan investasi infrastruktur di bidang transportasi karena terbukti meningkatkan PDRB.

- b. Meninjau kembali kebijakan pengeluaran pemerintah infrastruktur pertanian dan irigasi ternyata tidak produktif karena berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB, sehingga kebijakan tersebut perlu diteliti kembali tingkat keefektifannya atau perlu diteliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas pengeluaran publik infrastruktur tersebut
- c. Selain itu, dengan kewenangan otonomi Pemerintah Daerah, yang terbukti dapat meningkatkan PDRB, untuk tetap menjalankan kebijakan pengeluaran pemerintah yang lebih efektif dan produktif.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Disarankan kepada peneliti yang akan datang agar hasil penelitian dapat memberikan temuan yang lebih komprehensif untuk menambahkan variabel seperti pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur fisik lainnya atau meneliti faktor faktor lain yang menyebabkan pengeluaran pemerintah tidak produktif. Selain itu penelitian bisa diperluas dengan menambah variabel pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur sosial dan infrastruktur finansial. Untuk dapat mengetahui apakah kenaikan dari PDRB tersebut berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran, maka perlu diteliti lebih lanjut pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta distribusi pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

ALhusin, Syahri. (2003). *Aplikasi Statistik Dengan SPSS. 10 For Windows*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Boopen, Seetanah. (2006). Transport Infrastructure And Economic Growth: Evidence From Africa Using Dynamic Panel Estimates. *The Empirical Economics Letters*.

Canning, D., Fay M. dan Perotti R. (1994). *Infrastructure and Growth*, dalam *International Differences in Growth Rates*. edited by M. Baldassarri, M. Paganaetto dan E.S. Phelps, New York, St. Martins Press

Canning, David dan Pedroni, Peter. (1999). *Infrastructure And Long Run Economic Growth*. *Journal Of Economic Literature*.

Cooper, D.R. dan Emory, C.W. (1995). *Business Research Methods*. US: Irwin.

Dornbusch, R., S.Fischer, and R.Startz. 2004. *Macroeconomics*, 9th ed., McGraw-Hill, Boston

Easterly, W. dan Robelo, S. (1993). *Fiscal Policy and Economic Growth*, *Journal of Monetary Economics*, 32, 417-58

Ford, R. and P.Poret (1991), 'Infrastructure and private sector productivity', OECD Economics Department working papers No 91

Frank N. Magill, *International Encyclopedia of Government and Politics*, Toppan Company LTD, Singapore, 1996

Frederico, G. Jayme. (2009). Public Expenditure On Infrastructure And Economic Growth Across Brazilian States. *Journal Of Economic Literature*.

Ghosh, B. dan P. De. (2005). Investigating The Linkage Between Infrastructure and Regional Development in India: Era Of Planning To Globalization. *Journal Of Asian Economies*. Vol. 15, No. 6, PP- 1023- 1050.

Gove, D dan Morgan. W. (1994). *Optimizing Truck- Loader Matching. Mining Engineering*.

Hogendorn, J.S. 1992. *Economic Development*. New York: Harper Collins.

Jhingan ML (2004). *Monetary Economics*. 6th ed. Vrinda Publications (P) Ltd, Delhi, India, pp.174-192.

Kuncoro, Dan Pindyk (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Vu Le, M., & Suruga, T. (2005). Foreign Direct Investment, Public Expenditure and Economic Growth: The Empirical Evidence for the Period 1970-2001. *Applied Economic Letters*

Lee, M. James(2005). *Biochemical Engineering*. Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey, USA

Mankiw, Solow. (2003). *A Contribution to the Theory of Economic Growth*. *Quarterly Journal of Economics*, hal. 175.

Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makroekonomi*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.

Mankiw, N. Romer, D dan Weil, D (1992). *A Contribution to the Empirics of Economic Growth*. *The Quarterly Journal of Economics*,

M.L. Jhingan (2004), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, cetakan kesepuluh,. Rajawali Pers, Jakarta.

Nacrowi, (2006). *Pendekatan populer dan praktis Ekonometrika untuk analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nourzad F and Martin Vrieze (1995), ' Public Capital Formation and Economic Growth: Some International Evidence.' *Journal of Productivity Analysis*.

Polasek, W. and Berrer H. (2005). *Regional Growth modelling and traffic accessibility*. IHS Wien. mimeo.

Semmler, Willi & Greiner, Alfred & Diallo, Bobo & Rezai, Armon & Rajaram, Anand, 2007. "Fiscal policy, public expenditure composition, and growth theory and empirics," *Policy Research Working Paper Series 4405*, The World Bank.

Stoker, Gerry, The Politics of Local Government, 2nd edition, The Macmillan Press, London, 1991.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Taggart, Douglas. Mc., Findlay, Christopher, dan Parkin Michael. (2003). *Economics*. Fourth Edition. Frenchs Forest NSW: Addison Wesley.

Taylor, John B. (2001), "The Role of Exchange Rates in Monetary Policy Rules," *American Economic Review, Papers and Proceedings*.

Taylor-Lewis, R. (1993), 'The Role of Infrastructure in Productivity and Output Growth: A Case Study of the Group of Seven', Unpublished Ph.D. Dissertation. College Park, MD: University of Maryland, 1993

Todaro, Michael dan Stephen C Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Waluyo (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

World Bank (1994). *World Development Report 1994- Infrastructure for Development*, Oxford University Press, New York.



Lampiran 1

Data Pengeluaran Publik Infrastruktur Transportasi, Pertanian, dan Irigasi

Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Bima

Tahun	TRANSPORTASI	PERTANIAN	IRIGASI
1990	3.996,45	1.637,80	1.115,45
1991	5.090,93	1.909,06	1.509,67
1992	5.668,33	2.194,73	1.626,15
1993	5.711,02	2.703,57	2.091,77
1994	7.145,85	2.770,82	1.984,38
1995	6.093,41	2.938,93	790,85
1996	8.965,81	2.524,83	434,15
1997	8.920,76	5.254,22	271,23
1998	4.018,51	2.380,71	3.323,72
1999	13.243,33	5.457,58	2.382,43
2000	5.403,42	9.381,70	2.246,71
2001	4.634,38	6.253,31	4.884,15
2002	10.045,01	10.493,29	6.631,97
2003	11.862,30	9.831,15	4.266,40
2004	11.775,61	11.120,25	3.653,15
2005	13.368,28	14.054,35	3.927,08
2006	19.376,04	19.935,65	4.392,35
2007	24.702,90	21.705,38	5.968,95
2008	24.702,25	24.774,67	7.269,13

Sumber: LPJ APBD Kabupaten Bima (1990-2008),
Inpres Pembangunan (1990-2002)

Lampiran 1 (lanjutan)

Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Dompu

Tahun	TRANSPORTASI	PERTANIAN	IRIGASI
1990	2.992,22	186,21	301,61
1991	3.636,12	320,13	446,91
1992	4.302,95	334,73	468,93
1993	4.810,45	387,92	532,32
1994	5.350,34	422,59	592,01
1995	5.623,02	524,27	259,24
1996	6.972,02	1.420,02	161,23
1997	7.367,40	3.119,98	184,46
1998	9.119,64	1.490,66	781,03
1999	7.299,64	1.055,42	815,06
2000	7.490,99	3.036,22	1.907,75
2001	9.754,93	6.849,35	7.956,56
2002	11.446,51	12.483,79	5.150,08
2003	10.269,35	11.817,76	3.865,50
2004	12.376,25	16.765,50	4.012,20
2005	15.521,10	16.706,16	4.945,75
2006	19.971,85	20.730,07	5.855,75
2007	23.019,25	24.268,85	7.378,45
2008	26.253,40	28.277,85	8.831,85

Sumber: LPJ APBD Kabupaten Dompu (1990-2008),
Inpres Pembangunan (1990-2002)

Lampiran 1 (lanjutan)

Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Lombok Barat

Tahun	TRANSPORTASI	PERTANIAN	IRIGASI
1990	2.916,53	2.256,52	741,40
1991	3.688,24	3.599,00	1.076,88
1992	4.142,68	3.893,21	1.407,45
1993	4.634,45	4.700,45	1.281,82
1994	5.189,05	5.214,87	1.434,20
1995	5.861,42	5.717,47	837,41
1996	3.390,39	6.786,73	545,56
1997	7.512,99	10.531,06	348,51
1998	8.104,15	3.431,98	202,91
1999	9.781,70	2.906,69	1.465,19
2000	8.436,72	2.507,02	1.263,75
2001	15.042,61	5.467,24	4.313,70
2002	16.401,04	4.707,48	6.611,04
2003	15.335,00	5.918,76	5.073,00
2004	16.798,70	5.717,60	6.640,45
2005	20.673,45	7.033,88	6.702,55
2006	27.052,00	10.191,35	7.682,15
2007	32.070,06	13.102,70	10.353,45
2008	37.829,15	14.147,38	1.949,31

Sumber: LPJ APBD Kabupaten Lombok Barat (1990-2008), Inpres Pembangunan (1990-2002)

Lampiran 1 (lanjutan)

Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	TRANSPORTASI	PERTANIAN	IRIGASI
1990	2.252,21	814,15	649,06
1991	2.692,56	1.478,24	915,32
1992	2.998,06	1.457,00	954,58
1993	4.651,48	1.634,01	1.084,55
1994	3.768,57	1.809,30	1.212,25
1995	4.153,54	2.130,74	1.231,13
1996	4.862,95	4.164,72	1.170,62
1997	6.319,91	4.792,46	1.698,60
1998	7.608,18	5.293,04	331,53
1999	6.452,68	5.083,53	1.747,55
2000	10.202,50	2.004,68	3.982,91
2001	13.757,36	5.026,70	7.221,66
2002	18.044,13	10.984,74	10.343,67
2003	15.850,90	10.237,56	8.298,45
2004	17.786,08	17.368,35	5.748,35
2005	22.611,80	14.839,81	8.702,80
2006	29.351,95	21.260,68	11.699,85
2007	34.492,50	23.551,35	11.403,26
2008	40.273,45	26.719,02	13.239,90

Sumber: LPJ APBD Kabupaten Lombok Tengah (1990-2008), Inpres Pembangunan (1990-2002)

Lampiran 1 (lanjutan)

Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Lombok Timur

Tahun	TRANSPORTASI	PERTANIAN	IRIGASI
1990	2.384,97	1.834,31	1.145,41
1991	2.998,21	2.785,15	1.624,80
1992	3.661,35	3.280,85	1.713,52
1993	3.814,29	3.916,95	1.894,89
1994	4.212,76	4.067,61	2.129,11
1995	4.652,84	4.575,79	2.212,25
1996	5.085,66	8.162,88	1.402,89
1997	5.610,72	5.938,71	319,31
1998	6.951,91	5.271,67	1.868,46
1999	6.764,67	4.313,35	1.375,43
2000	7.178,28	3.962,33	2.326,81
2001	18.894,79	8.369,04	7.746,32
2002	17.504,04	9.856,28	32.869,23
2003	15.351,35	9.231,40	10.068,16
2004	15.886,50	10.366,54	10.794,90
2005	21.600,46	12.322,55	12.943,40
2006	28.764,60	17.447,80	13.115,90
2007	33.803,30	20.946,06	18.836,26
2008	40.144,70	24.321,75	22.056,85

Sumber: LPJ APBD Kabupaten Lombok Timur (1990-2008), Inpres Pembangunan (1990-2002)

Lampiran 1 (lanjutan)

Pengeluaran Publik Infrastruktur pada Kabupaten Sumbawa

Tahun	TRANSPORTASI	PERTANIAN	IRIGASI
1990	5.100,93	1.122,74	827,25
1991	5.759,09	1.748,07	1.465,68
1992	6.243,30	2.121,24	1.341,51
1993	7.197,26	2.123,62	1.385,74
1994	8.086,72	2.452,95	1.556,90
1995	8.910,67	2.910,20	520,05
1996	10.350,62	2.473,07	1.102,95
1997	10.141,08	2.383,73	161,67
1998	5.813,71	3.807,85	374,56
1999	14.160,47	4.321,15	1.814,73
2000	7.128,33	4.441,25	4.662,03
2001	21.361,37	10.631,60	16.888,12
2002	22.117,05	15.199,08	16.854,17
2003	24.710,06	15.758,40	17.997,45
2004	27.072,60	16.946,30	19.497,15
2005	36.199,46	18.896,16	24.886,25
2006	43.780,55	25.254,68	28.995,29
2007	52.761,90	30.481,40	33.957,29
2008	61.327,10	34.444,85	38.756,95

Sumber: LPJ APBD Kabupaten Sumbawa (1990-2008),
Inpres Pembangunan (1990-2002)

Lampiran 2

Data PDRB Enam Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat

PDRB Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun	BIMA	DOMPU	LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	SUMBAWA
1990	193,208	85,218	357,629	215,362	299,434	181,793
1991	222,524	101,172	419,600	255,091	331,547	242,231
1992	254,422	118,625	349,908	289,987	400,484	274,640
1993	383,500	144,932	456,607	394,533	518,154	384,216
1994	449,112	169,423	522,713	448,956	605,198	412,145
1995	519,667	197,523	613,245	519,365	717,409	447,810
1996	592,607	228,438	699,063	598,957	813,661	602,504
1997	671,297	261,111	812,933	668,461	930,496	702,048
1998	1,028,918	467,150	1,295,991	1,107,820	1,599,315	1,100,331
1999	1,114,491	539,016	1,391,541	1,194,795	1,706,030	1,375,663
2000	969,169	607,014	1,254,248	1,319,954	1,877,863	1,093,894
2001	1,116,316	703,724	1,764,835	1,486,215	2,122,927	1,252,318
2002	1,228,724	782,564	1,984,184	1,649,836	2,317,093	1,396,224
2003	1,380,952	903,378	1,587,174	1,930,122	2,691,583	1,614,549
2004	1,525,621	983,030	1,791,956	2,131,040	3,007,906	1,795,531
2005	1,670,150	1,111,864	2,095,720	2,415,626	3,418,931	2,078,961
2006	1,856,381	1,233,927	2,410,771	2,703,055	3,825,770	2,339,417
2007	2,064,082	1,390,315	2,741,482	3,038,473	4,283,699	2,637,990
2008	2,375,242	1,551,158	3,127,015	3,528,362	4,879,687	3,019,675

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (2009)

Lampiran 3-1

**Uji Regresi Variabel Transportasi, Pertanian, Irigasi, dan Dummy
Terhadap Variabel PRDB Pada Kabupaten Bima**

Dependent Variable: PRDB_BIMA
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/31/11 Time: 15:39
 Sample: 1990 2008
 Included observations: 19
 Cross-sections included: 6
 Total pool (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	215503.8	46247.24	4.659820	0.0000
TRANS_BIMA	17.10792	7.683271	2.226645	0.0280
PRTAN_BIMA	46.80427	8.834024	5.298182	0.0000
IRGSI_BIMA	52.05775	18.49363	2.814902	0.0058
DUMMY_BIMA	220965.2	75390.12	2.930956	0.0041
R-squared	0.914424	Mean dependent var		1032441.
Adjusted R-squared	0.911284	S.D. dependent var		638904.6
S.E. of regression	190299.3	Akaike info criterion		27.19345
Sum squared resid	3.95E+12	Schwarz criterion		27.31346
Log likelihood	-1545.027	Hannan-Quinn criter.		27.24216
F-statistic	291.1814	Durbin-Watson stat		0.790070
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3-2

**Uji Regresi Variabel Transportasi, Pertanian, Irigasi, dan Dummy
Terhadap Variabel PRDB Pada Kabupaten Dompu**

Dependent Variable: PRDB_DOMPU
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/31/11 Time: 15:39
 Sample: 1990 2008
 Included observations: 19
 Cross-sections included: 6
 Total pool (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-72118.19	36794.26	-1.960039	0.0525
TRANS_DOMPU	60.86438	7.448547	8.171309	0.0000
PRTAN_DOMPU	-11.99199	7.314945	-1.639382	0.1040
IRGSI_DOMPU	-14.51661	4.820389	-3.011501	0.0032
DUMMY_DOMPU	493515.4	78165.63	6.313713	0.0000
R-squared	0.958319	Mean dependent var		609451.7
Adjusted R-squared	0.956789	S.D. dependent var		463651.5
S.E. of regression	96380.02	Akaike info criterion		25.83285
Sum squared resid	1.01E+12	Schwarz criterion		25.95286
Log likelihood	-1467.473	Hannan-Quinn criter.		25.88156
F-statistic	626.5242	Durbin-Watson stat		0.997586
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3-3

**Uji Regresi Variabel Transportasi, Pertanian, Irigasi, dan Dummy
Terhadap Variabel PRDB Pada Kabupaten Lombok Barat**

Dependent Variable: PRDB_LBKBRT
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/31/11 Time: 15:40
 Sample: 1990 2008
 Included observations: 19
 Cross-sections included: 6
 Total pool (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	455038.1	36156.56	12.58522	0.0000
TRANS_LBKBRT	87.50126	4.483643	19.51566	0.0000
PRTAN_LBKBRT	-48.91108	8.750078	-5.589789	0.0000
IRGSI_LBKBRT	11.22059	6.631693	1.691965	0.0935
DUMMY_LBKBRT	44935.68	84738.70	0.530285	0.5970
R-squared	0.957199	Mean dependent var		1351401.
Adjusted R-squared	0.955628	S.D. dependent var		837287.5
S.E. of regression	176371.0	Akaike info criterion		27.04144
Sum squared resid	3.39E+12	Schwarz criterion		27.16144
Log likelihood	-1536.362	Hannan-Quinn criter.		27.09014
F-statistic	609.4186	Durbin-Watson stat		0.418771
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3-4

**Uji Regresi Variabel Transportasi, Pertanian, Irigasi, dan Dummy
Terhadap Variabel PRDB Pada Kabupaten Lombok Tengah**

Dependent Variable: PRDB_LBKTNG
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/31/11 Time: 15:42
 Sample: 1990 2008
 Included observations: 19
 Cross-sections included: 6
 Total pool (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	274288.1	28548.20	9.607893	0.0000
TRANS_LBKTNG	83.72782	8.228458	10.17540	0.0000
PRTAN_LBKTNG	-7.321909	10.93587	-0.669531	0.5046
IRGSI_LBKTNG	-31.04626	7.853001	-3.953426	0.0001
DUMMY_LBKTNG	557261.7	101948.7	5.466098	0.0000
R-squared	0.965512	Mean dependent var		1362948.
Adjusted R-squared	0.964247	S.D. dependent var		997816.2
S.E. of regression	188673.0	Akaike info criterion		27.17629
Sum squared resid	3.88E+12	Schwarz criterion		27.29630
Log likelihood	-1544.048	Hannan-Quinn criter.		27.22499
F-statistic	762.8831	Durbin-Watson stat		0.559598
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3-5

**Uji Regresi Variabel Transportasi, Pertanian, Irigasi, dan Dummy
Terhadap Variabel PRDB Pada Kabupaten Lombok Timur**

Dependent Variable: PRDB_LBKTMR
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/31/11 Time: 15:41
 Sample: 1990 2008
 Included observations: 19
 Cross-sections included: 6
 Total pool (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	369047.5	66814.51	5.523463	0.0000
TRANS_LBKTMR	105.3683	19.13019	5.507958	0.0000
PRTAN_LBKTMR	7.951927	28.36601	0.280333	0.7798
IRGSI_LBKTMR	-14.44946	7.399509	-1.952759	0.0534
DUMMY_LBKTMR	541011.5	174509.5	3.100183	0.0025
R-squared	0.928521	Mean dependent var		1913010.
Adjusted R-squared	0.925898	S.D. dependent var		1404563.
S.E. of regression	382345.4	Akaike info criterion		28.58891
Sum squared resid	1.59E+13	Schwarz criterion		28.70891
Log likelihood	-1624.568	Hannan-Quinn criter.		28.63761
F-statistic	353.9817	Durbin-Watson stat		1.333162
Prob(F-statistic)	0.000000			

**Uji Regresi Variabel Transportasi, Pertanian, Irigasi, dan Dummy
Terhadap Variabel PRDB Kabupaten Sumbawa**

Dependent Variable: PRDB_SMBWA
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/31/11 Time: 15:43
 Sample: 1990 2008
 Included observations: 19
 Cross-sections included: 6
 Total pool (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	271901.1	60432.24	4.499272	0.0000
TRANS_SMBWA	20.46664	10.59849	1.931089	0.0561
PRTAN_SMBWA	92.26148	20.70328	4.456370	0.0000
IRGSI_SMBWA	-49.43902	19.48872	-2.536802	0.0126
DUMMY_SMBWA	294290.2	162154.6	1.814874	0.0723
R-squared	0.917700	Mean dependent var		1207997.
Adjusted R-squared	0.914680	S.D. dependent var		841483.6
S.E. of regression	245794.4	Akaike info criterion		27.70525
Sum squared resid	6.59E+12	Schwarz criterion		27.82526
Log likelihood	-1574.199	Hannan-Quinn criter.		27.75395
F-statistic	303.8550	Durbin-Watson stat		0.590621
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4

Hasil pengujian regresi simultan (variabel)

Dependent Variable: PRDB?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/31/11 Time: 15:38
 Sample: 1990 2008
 Included observations: 19
 Cross-sections included: 6
 Total pool (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	278951.7	79399.90	3.513250	0.0006
TRANS?	67.69548	11.99664	5.642872	0.0000
PRTAN?	-14.58997	14.87137	-0.981078	0.3287
IRGSI?	-16.25430	12.54935	-1.295230	0.1980
DUMMY?	693808.8	170663.5	4.065362	0.0001
R-squared	0.720320	Mean dependent var		1246208.
Adjusted R-squared	0.710057	S.D. dependent var		994220.2
S.E. of regression	535351.3	Akaike info criterion		29.26210
Sum squared resid	3.12E+13	Schwarz criterion		29.38211
Log likelihood	-1662.940	Hannan-Quinn criter.		29.31081
F-statistic	70.18294	Durbin-Watson stat		0.257313
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5

Hasil Uji Fixed Effect

Dependent Variable: PRDB?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/31/11 Time: 15:01
 Sample: 1990 2008
 Included observations: 19
 Cross-sections included: 6
 Total pool (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	242013.7	54597.83	4.432662	0.0000
TRANS?	77.31794	8.685542	8.901913	0.0000
PRTAN?	-16.90026	10.70177	-1.579202	0.1173
IRGSI?	-27.48032	9.125275	-3.011451	0.0033
DUMMY?	685370.2	123063.5	5.569241	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_BIMA--C	-65618.37			
_DOMPU--C	-477727.0			
_LBKBRT--C	59263.25			
_LBKTNG--C	122642.4			
_LBKTMR--C	739333.0			
_SMBWA--C	-377893.3			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.877603	Mean dependent var		1246208.
Adjusted R-squared	0.867011	S.D. dependent var		994220.2
S.E. of regression	362568.7	Akaike info criterion		28.52345
Sum squared resid	1.37E+13	Schwarz criterion		28.76346
Log likelihood	-1615.836	Hannan-Quinn criter.		28.62086
F-statistic	82.85500	Durbin-Watson stat		0.654189
Prob(F-statistic)	0.000000			